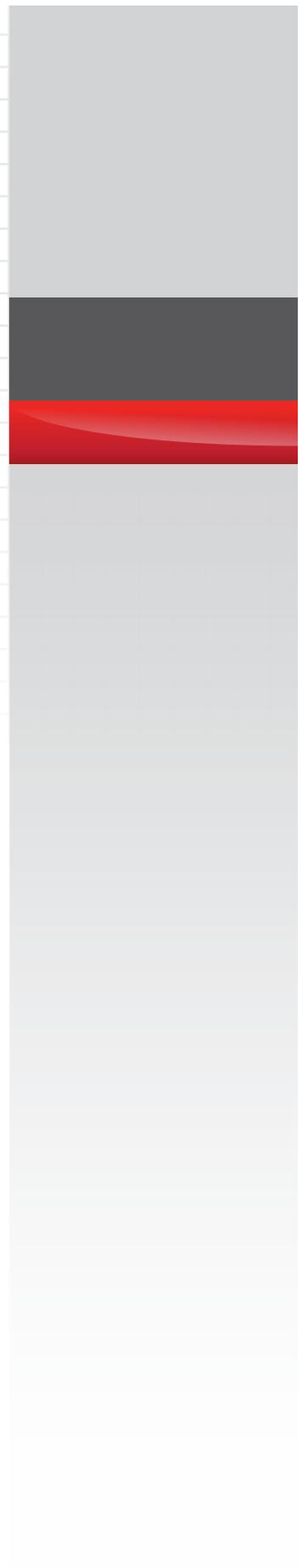
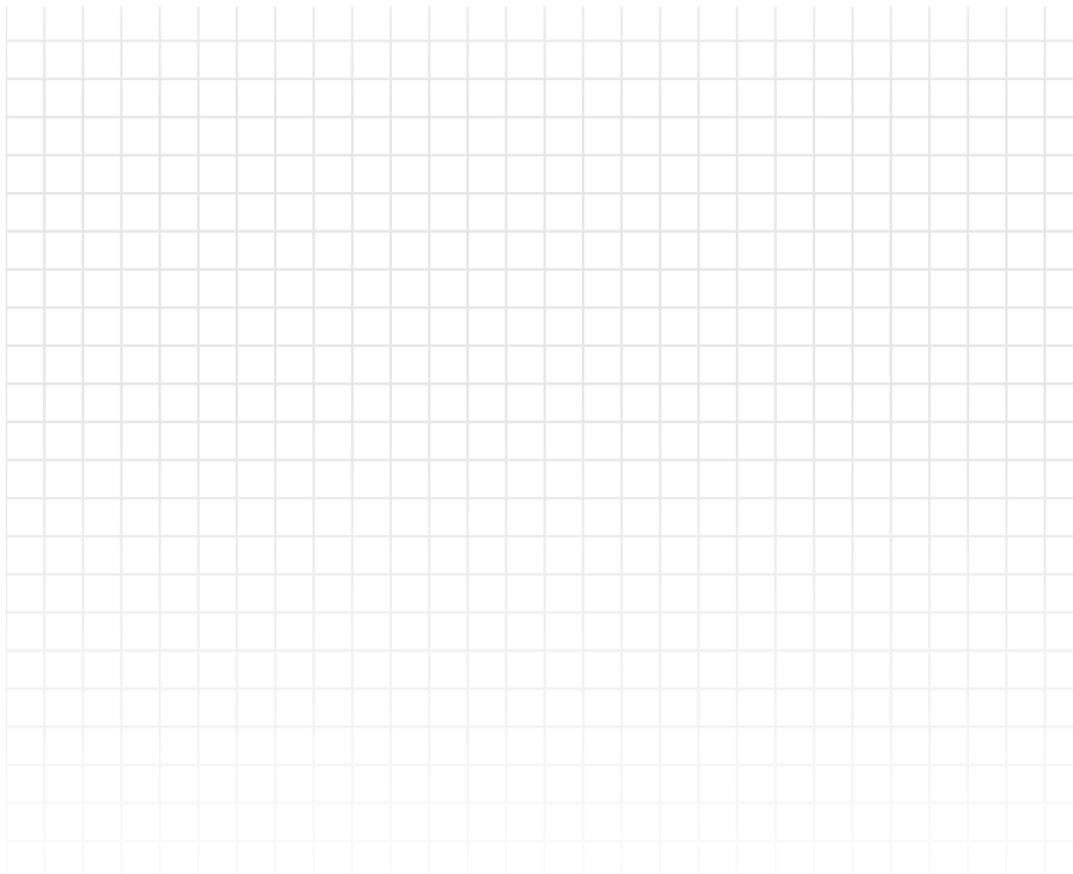


# Daftar Isi

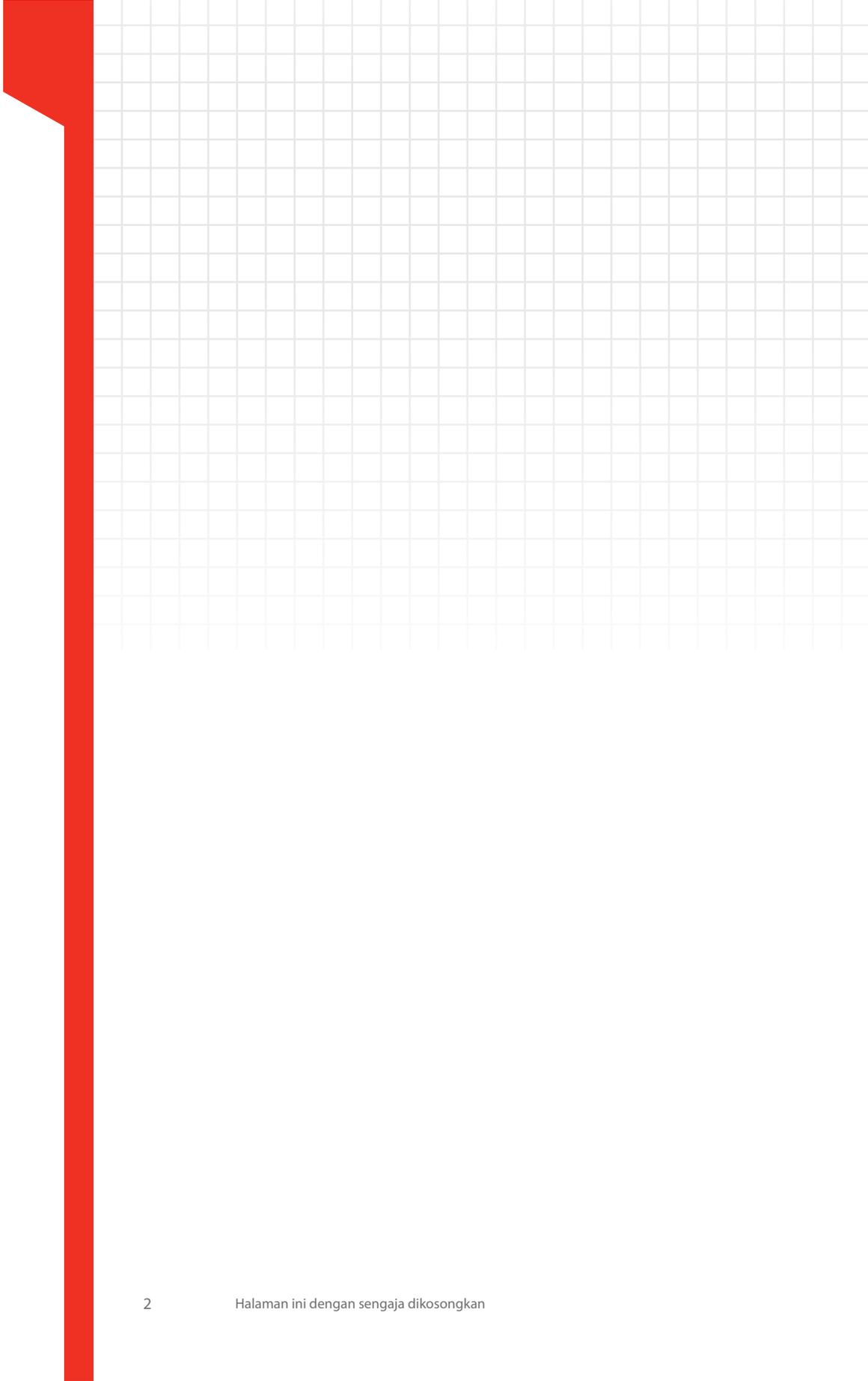
Laporan Kinerja OJK 2013

- I. Ringkasan Eksekutif
- II. Tentang OJK
- III. Kondisi Ekonomi Makro & Sektor Jasa Keuangan
- IV. Pencapaian Sasaran Strategis & IKU OJK 2013
- V. Pengaturan & Pengawasan Bidang Pasar Modal
- VI. Pengaturan & Pengawasan Bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
- VII. Edukasi & Perlindungan Konsumen (EPK)
- VIII. Pengalihan Fungsi Pengaturan & Pengawasan Perbankan dari BI ke OJK
- IX. Manajemen Strategis & Tata Kelola Organisasi, FGD & Survei
- X. Metodologi Manajemen Strategi & Discipline Execution Berbasis Balanced Scorecard
- XI. Pengembangan Pengawasan Terintegrasi
- XII. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)
- XIII. Arah Strategi OJK 2014





# Ringkasan Eksekutif



## I. Ringkasan Eksekutif



**S**ebagaimana diketahui bersama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya OJK juga perlu mencermati perkembangan perekonomian nasional dan global.

Perekonomian Indonesia sempat melambat pada pertengahan tahun 2013 karena kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM subsidi. Hal ini juga ditambah dengan meningkatnya *current account deficit*. Perlahan tapi pasti permasalahan ini mulai dapat diatasi dengan menekan volume impor, meningkatkan suku bunga dan regulasi di sektor jasa keuangan seperti *buyback* saham. Pada akhir 2013, perekonomian Indonesia mulai kembali di jalurnya dan seiring dengan pemulihan ekonomi global dan pelaksanaan pemilu 2014 diharapkan perekonomian Indonesia dapat meningkat kembali melalui peningkatan daya dorong ekspor dan konsumsi dalam negeri.

Secara umum kondisi Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank mencatat kinerja positif. Hal ini tentu awal menggembirakan bagi Indonesia yang masih mempunyai potensi berkembang yang sangat luas. Sementara itu Industri Perbankan juga mencatat pertumbuhan yang baik dibawah pengawasan dan pengaturan Bank Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2013 dilakukan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK sesuai amanat UU No 21 Tahun 2013 Tentang OJK. Selain itu, tonggak bersejarah operasionalisasi OJK di seluruh Indonesia juga telah diresmikan pada tanggal 6 Januari 2014 di berbagai kota dari Papua sampai dengan Banda Aceh. OJK mempunyai 6 Kantor Regional (KR) dan 29 Kantor OJK (KOJK) di seluruh wilayah NKRI.

Dengan bergabungnya pengawasan perbankan, maka kini OJK dapat melakukan pengawasan terintegrasi ke seluruh sektor jasa keuangan. Pengawasan terintegrasi merupakan salah satu faktor pendorong stabilisasi ekonomi Indonesia sehingga terjaga dengan baik di tengah kondisi global yang cenderung melambat. Pengawasan terintegrasi dapat memberi nilai tambah terhadap pelaku industri keuangan baik pasar modal dan industri keuangan non bank maupun perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri masyarakat menggunakan produk dan layanan keuangan, serta menciptakan pasar yang wajar dan teratur, tahun 2013 ini OJK mulai melaksanakan program strategis di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Program pertama adalah pembentukan sistem pelayanan konsumen keuangan terintegrasi (Integrated Financial Customer Care - IFCC). Program yang memanfaatkan perang-

kat multi media ini diprioritaskan untuk meningkatkan ketersediaan informasi bagi masyarakat dan pelayanan pengaduan konsumen keuangan sesuai dengan kewenangan OJK. Kemudian, dalam rangka membekali masyarakat mengenai pengetahuan keuangan, OJK juga meluncurkan cetak biru literasi keuangan nasional yang meliputi edukasi, transparansi, dan pemberdayaan konsumen.

Kinerja OJK dalam menjalankan amanahnya untuk menciptakan sektor jasa keuangan yang tangguh dan stabil diukur dengan menggunakan dasar realisasi capaian 8 program strategis sesuai dengan target indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana yang dijanjikan OJK pada saat pengajuan anggaran ke DPR pada tahun 2012. Pengukuran kinerja menggunakan pendekatan *balance scorecard* dengan menilai tingkat pencapaian produk, dan prestasi dalam melaksanakan program kerja OJK, termasuk penyerapan anggaran. Secara umum kinerja OJK dinilai berhasil dengan kriteria “memuaskan” sebagaimana yang dilaporkan pada buku laporan kinerja. Bahkan terdapat beberapa pencapaian strategis lainnya yang berhasil dicapai.

Percepatan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya internal dilakukan dengan mengembangkan dan membangun berbagai fungsi manajemen strategis dengan tidak melupakan aspek tata kelola yang baik. Pengalaman dalam membangun sistem dan tata kelola dari lembaga yang sudah ada dengan memodifikasi dan menyesuaikan dengan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan OJK mendorong seluruh komponen bekerja ekstra keras agar dapat mengatasi problem yang terjadi.

Tentu disadari sepenuhnya masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan seperti penyempurnaan berbagai sistem informasi secara terintegrasi, tata kerja dan organisasi, termasuk penyiapan kebutuhan infrastruktur untuk operasionalisasi kantor perwakilan OJK di daerah. Kebutuhan untuk memiliki gedung kantor pusat OJK secara terpadu dan menyatu termasuk aspek yang sangat mendesak mengingat operasionalisasi kantor OJK yang saat ini masih berlokasi pada 3 lokasi yang berbeda menyulitkan koordinasi pelaksanaan tugas.

Terdapat beberapa capaian yang sudah dilakukan oleh OJK. Salah satunya adalah menyusun nilai strategis yang diikuti dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh Dewan Komisiner dan pegawai. OJK juga telah membentuk Komite Etik yang terdiri atas komite etik level *governance* yakni komite yang mengawasi kepatuhan anggota Dewan Komisiner terhadap Kode Etik OJK. Lalu, komite etik level manajemen, yakni komite yang mengawasi kepatuhan pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik. Ke depan, OJK akan fokus melakukan penyempurnaan dan harmonisasi peraturan di industri jasa keuangan yang masuk dalam lingkup kewenangan seperti perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank (IKNB). Tujuannya agar tercipta industri keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif.

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN

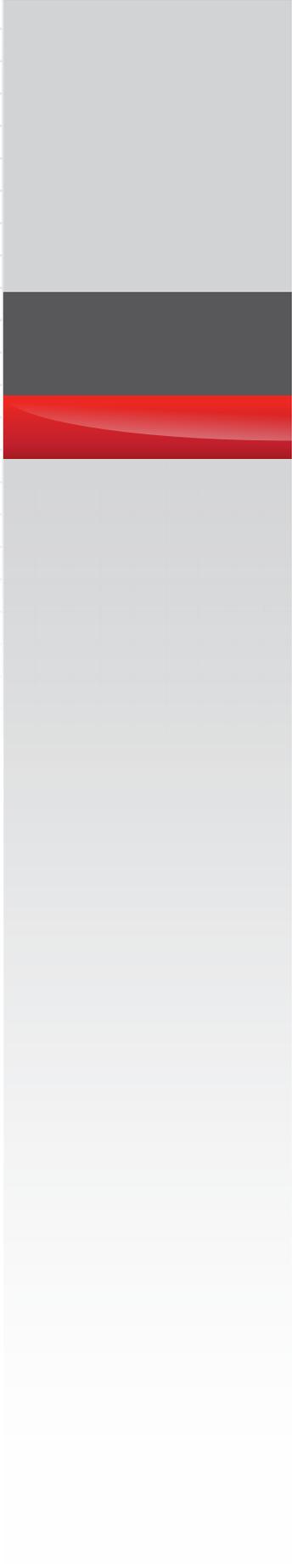
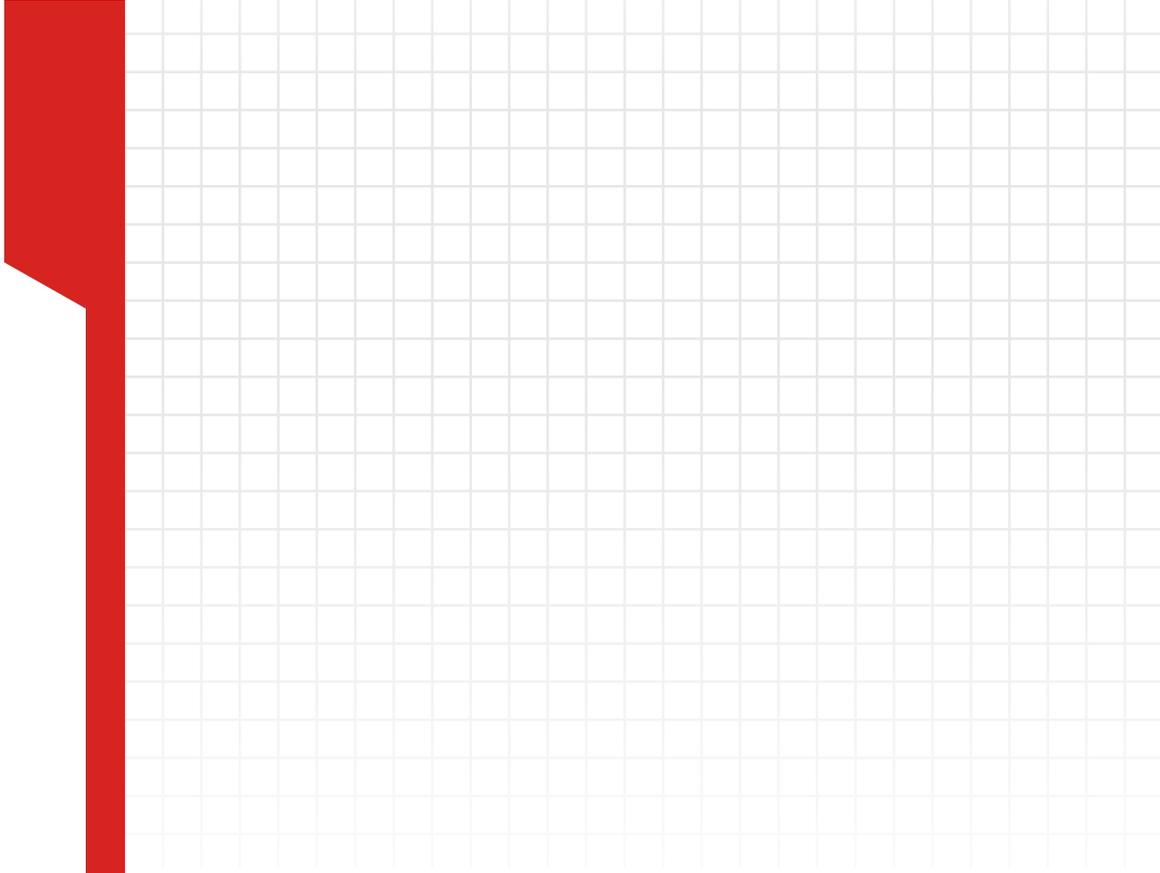
Dr. Muliaman D. Hadad



## Tentang OJK

- Misi dan Visi
- Tujuan
- Nilai-Nilai Strategis





## II. Tentang OJK

### **MISI:**

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara **teratur, adil, transparan, dan akuntabel**;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara **berkelanjutan dan stabil**;
3. Melindungi kepentingan **konsumen dan masyarakat**.

### **VISI:**

“Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.”

## Tujuan, Fungsi, Tugas & Kewenangan OJK

### Dasar Hukum: UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK (Bab III)

#### ● Tujuan

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.



#### ● Fungsi

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.



#### ● Tugas

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.



#### ● Kewenangan

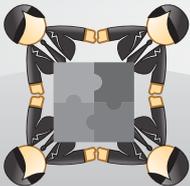
OJK juga memiliki kewenangan:

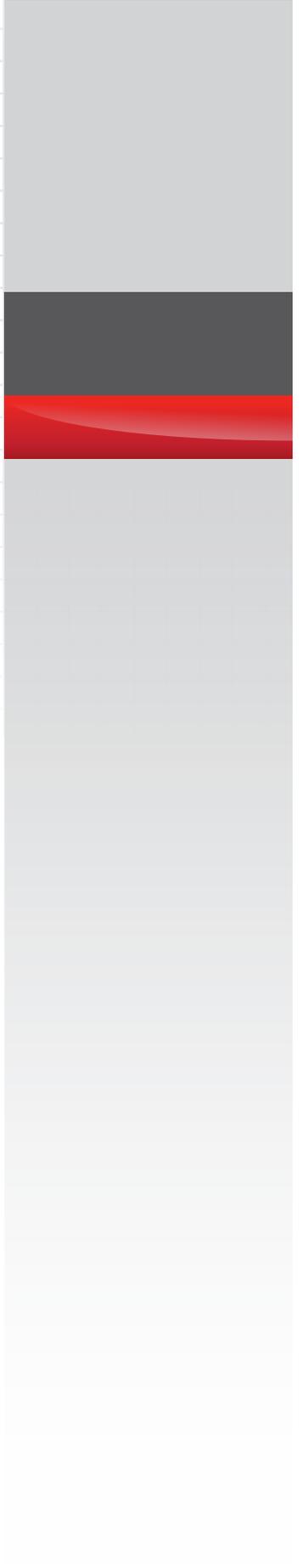
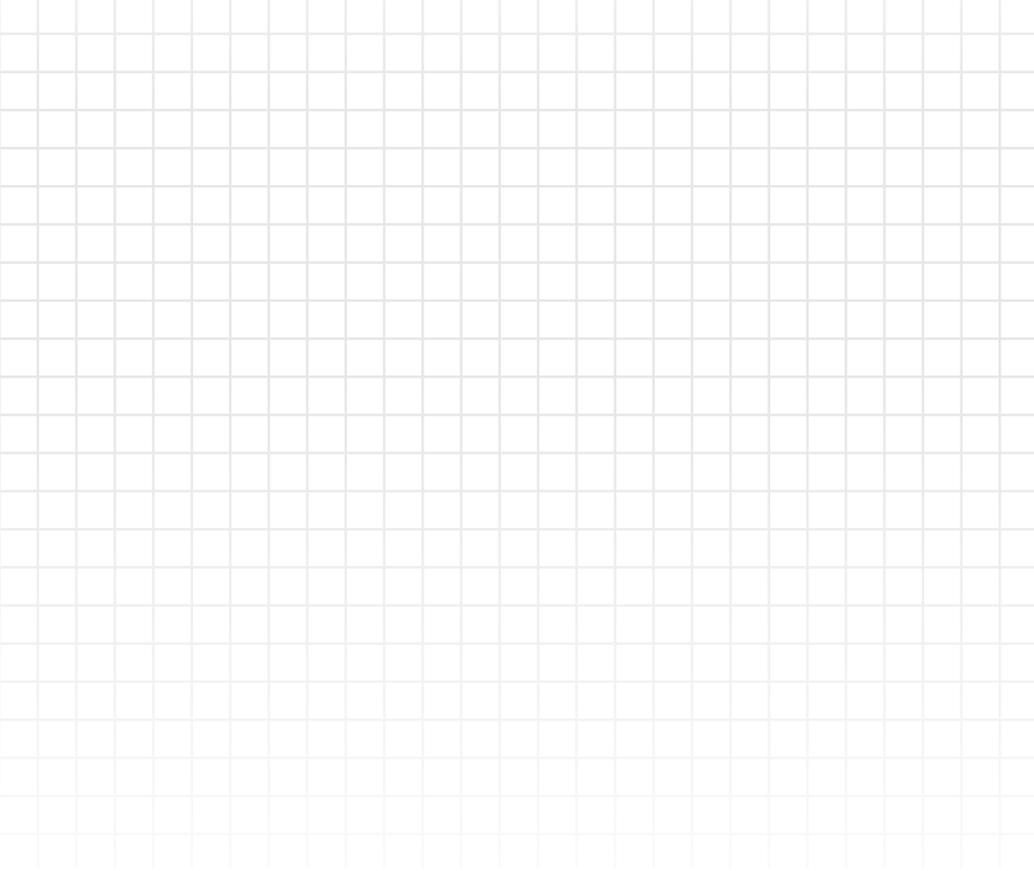
- Mengatur dan mengawasi bank
- Mengatur dan mengawasi kesehatan bank
- Mengatur dan mengawasi aspek kehati-hatian bank
- Memeriksa bank



## II. Tentang OJK

### Nilai-nilai Strategis OJK

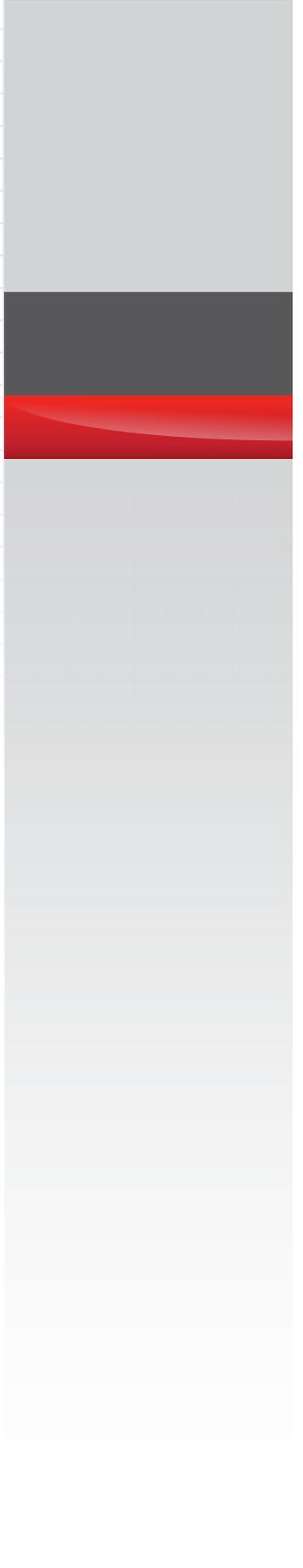
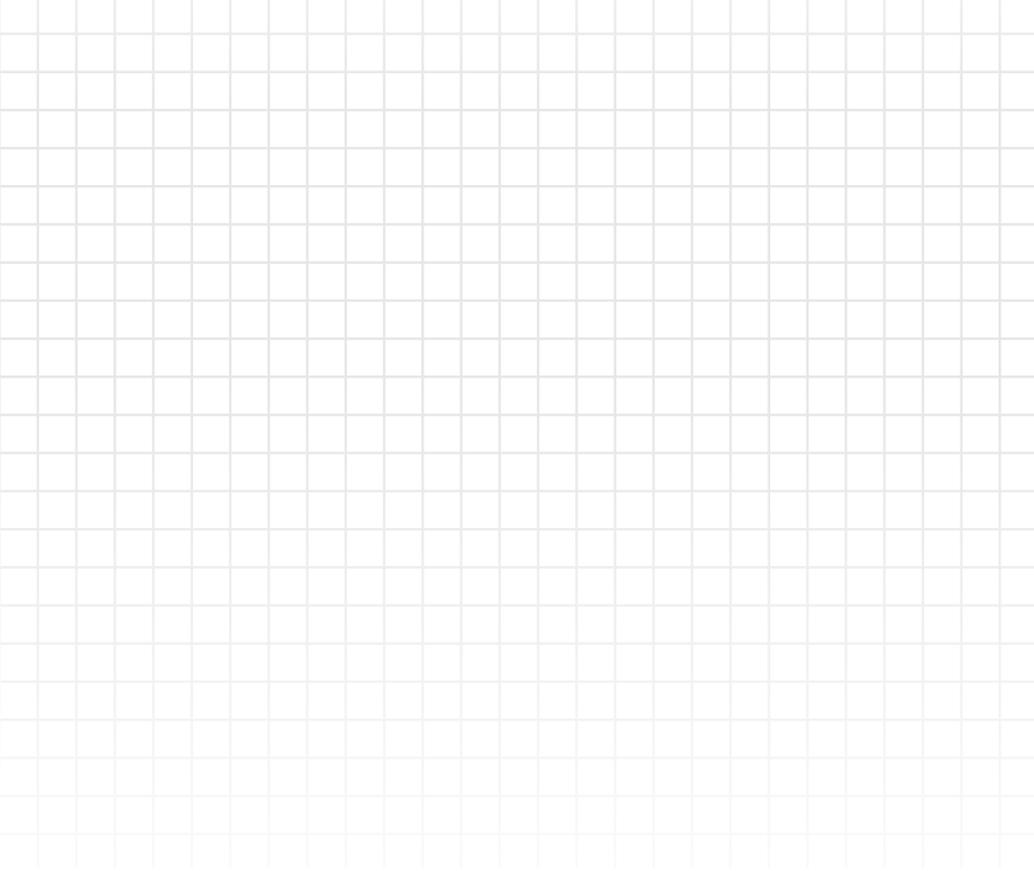
	NILAI -NILAI	MAKNA NILAI	PERILAKU UTAMA
1	<b>INTEGRITAS</b> 	Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jujur dan dipercaya</li> <li>2. Bijak</li> <li>3. konsisten dalam perkataan dan perbuatan</li> </ol>
2	<b>PROFESIONALISME</b> 	Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belajar berkelanjutan</li> <li>2. Memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan</li> <li>3. Berkomitmen terhadap hasil karya yang berkualitas.</li> </ol>
3	<b>SINERGI</b> 	Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun rasa saling percaya dan saling menghargai</li> <li>2. Berkomunikasi secara efektif</li> <li>3. Mencari solusi terbaik untuk memperoleh nilai tambah</li> </ol>
4	<b>INKLUSIF</b> 	Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghargai keberagaman</li> <li>2. Berperilaku adil</li> <li>3. Partisipatif, kontributif, fasilitatif, dan edukatif.</li> </ol>
5	<b>VISIONER</b> 	Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (forward looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (out of the box thinking).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencari dan mengembangkan konsep dan ide baru</li> <li>2. Melihat jauh ke depan</li> <li>3. Menginspirasi dan mendukung perubahan</li> </ol>



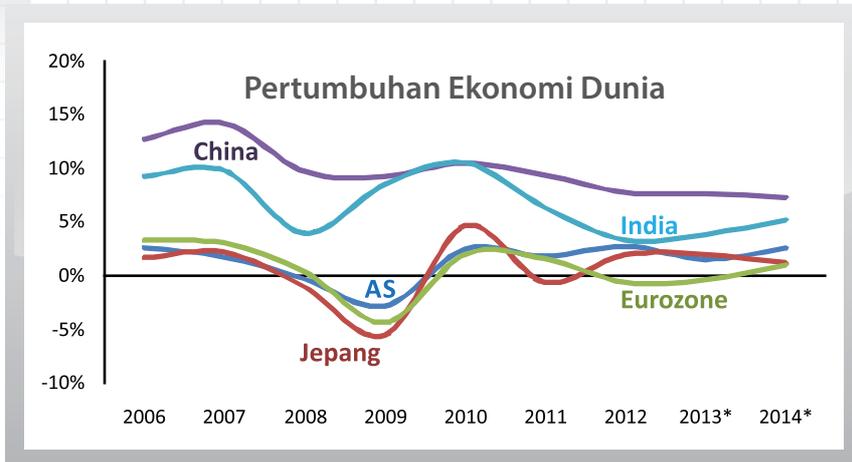


# Kondisi Ekonomi Makro & Sektor Jasa Keuangan

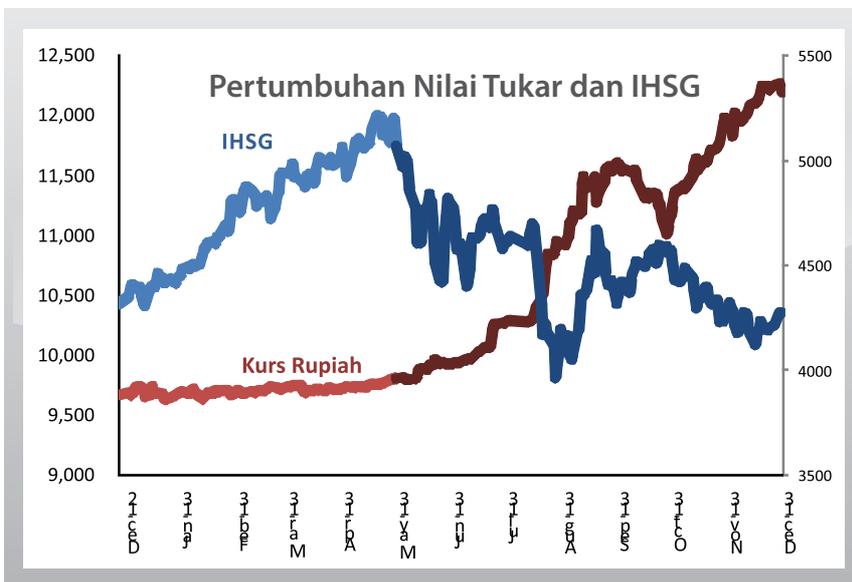




### III. Kondisi Ekonomi Makro & Sektor Jasa Keuangan

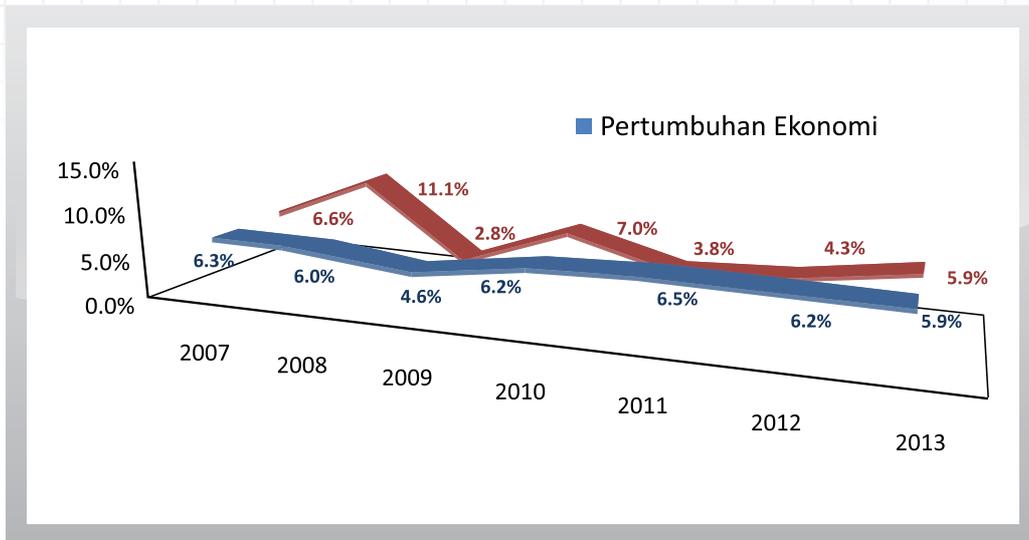


Kondisi ekonomi global mulai membaik khususnya di AS, Jepang, Eropa dan beberapa negara Asia lainnya. Hal ini akan berdampak positif terhadap ekspor, sehingga akan membuat defisit transaksi berjalan lebih terkendali, yang pada gilirannya akan berdampak positif pula terhadap pasar modal maupun nilai tukar rupiah (menengah dan panjang).



Perekonomian Indonesia sempat melambat pada triwulan 2 dan 3 tahun 2013 antara lain sebagai akibat inflasi yang relatif tinggi, namun dalam triwulan IV inflasi mengalami penurunan sebagai hasil kebijakan moneter dalam rangka meredam inflasi dan defisit transaksi berjalan (CAD). Saat ini perekonomian Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih baik.

### III. Kondisi Ekonomi Makro & Sektor Jasa Keuangan

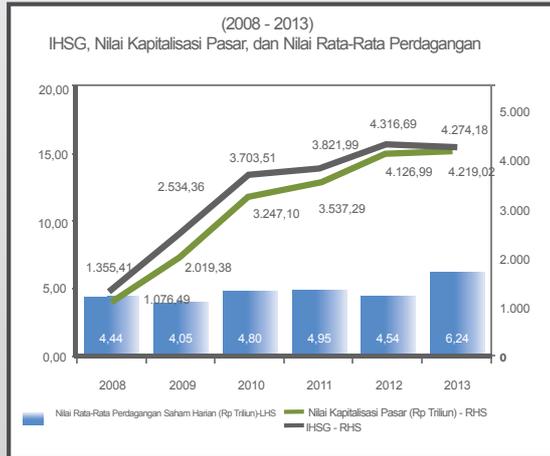
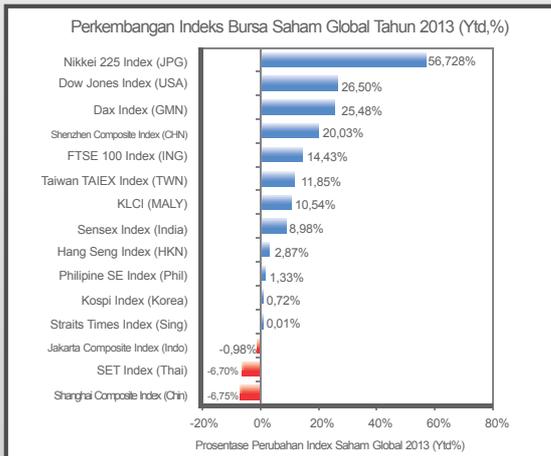


Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 mencapai 5,78 %. Tahun 2014 diperkirakan motor pertumbuhan masih berada pada sektor konsumsi dan ekspor. Pertumbuhan konsumsi semakin meningkat dikarenakan adanya pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden di tahun ini.

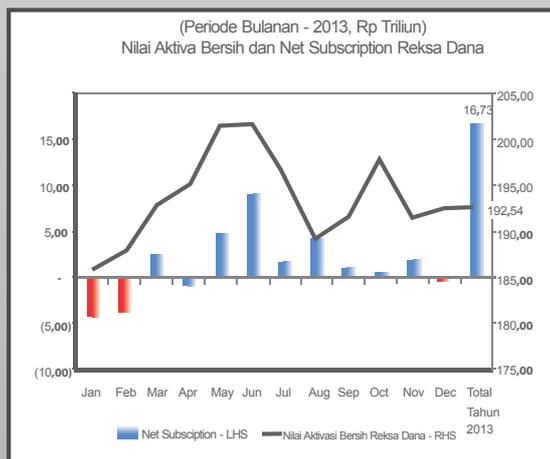
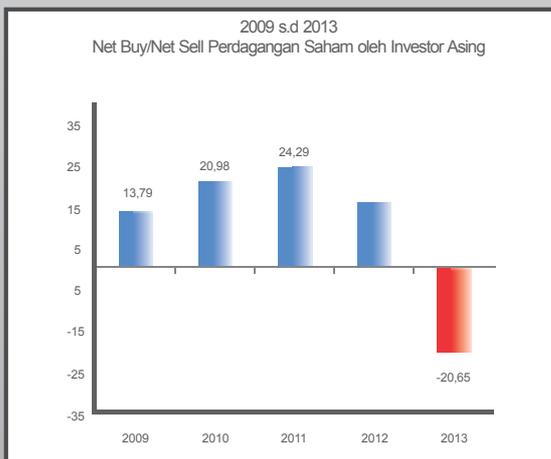
Pemulihan perekonomian global juga turut mendorong peningkatan ekspor Indonesia. Tantangan Indonesia berikutnya adalah pengelolaan Neraca Transaksi Berjalan dan Neraca Perdagangan yang semakin membaik. Bila hal ini dapat di atasi segera, maka laju pertumbuhan Indonesia akan semakin meningkat di tahun 2014.

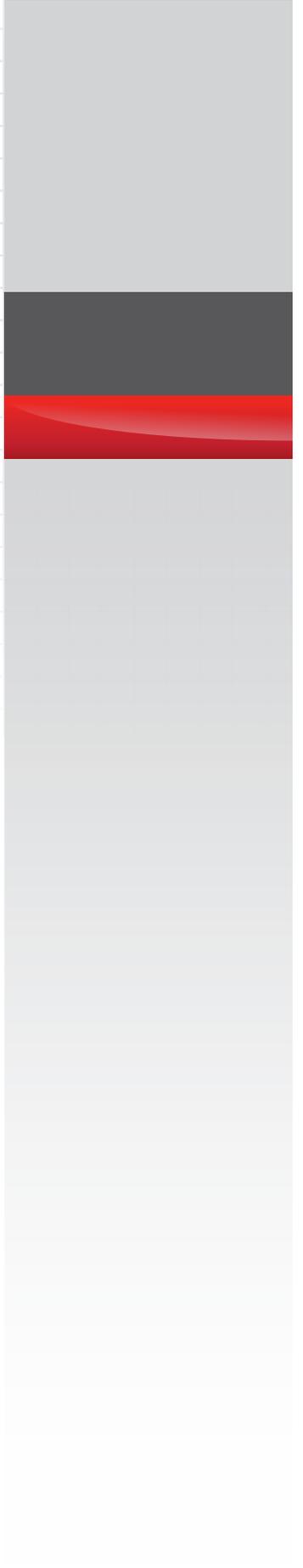
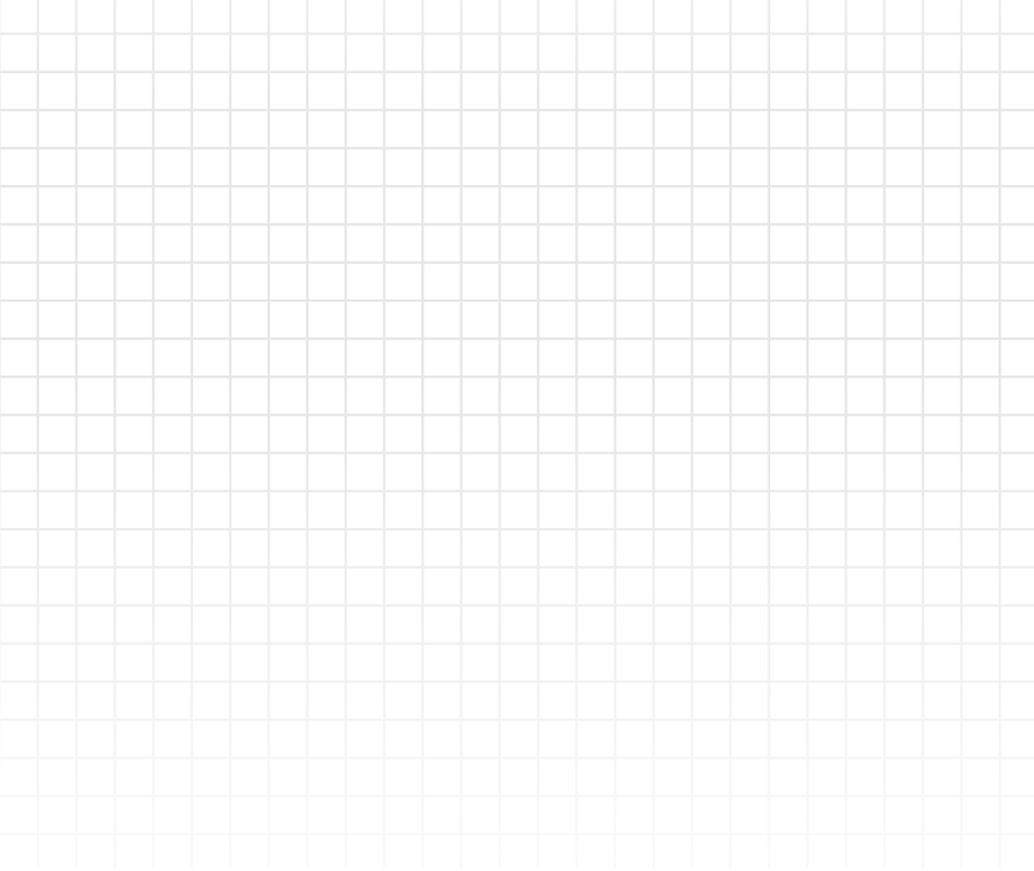
### III. Kondisi Ekonomi Makro & Sektor Jasa Keuangan

#### Highlight dan Kinerja Pasar Modal Indonesia



Kondisi perekonomian global yang sedang mengalami pemulihan dan isu *tapering off* secara bertahap mempengaruhi perkembangan Pasar Modal Dunia termasuk Indonesia. IHSG mulai mengalami *rebound* dan masih bergerak stabil dikisaran 4350 dengan *tendency* menuju 4500 setelah turun tajam pada pertengahan 2013. Kondisi perkembangan Pasar Modal saat ini juga ditentukan oleh perkembangan perekonomian nasional seperti Defisit transaksi berjalan, nilai tukar dan inflasi.



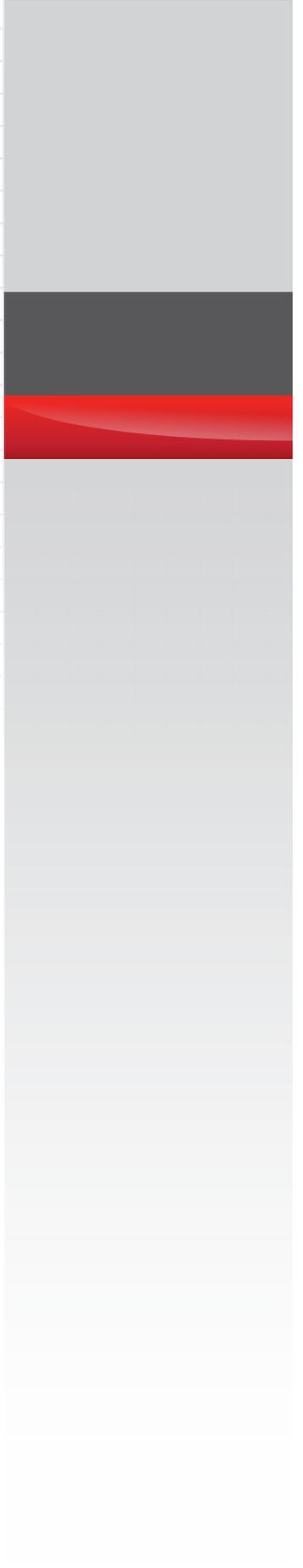
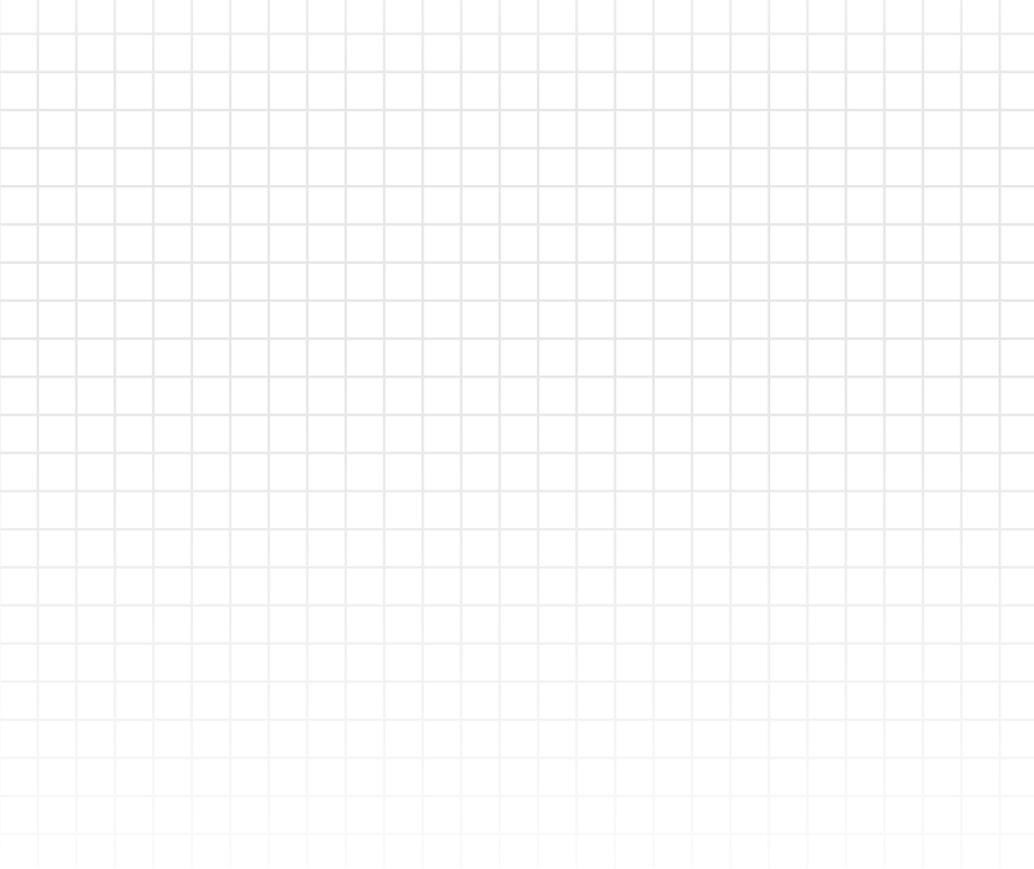




**IV**

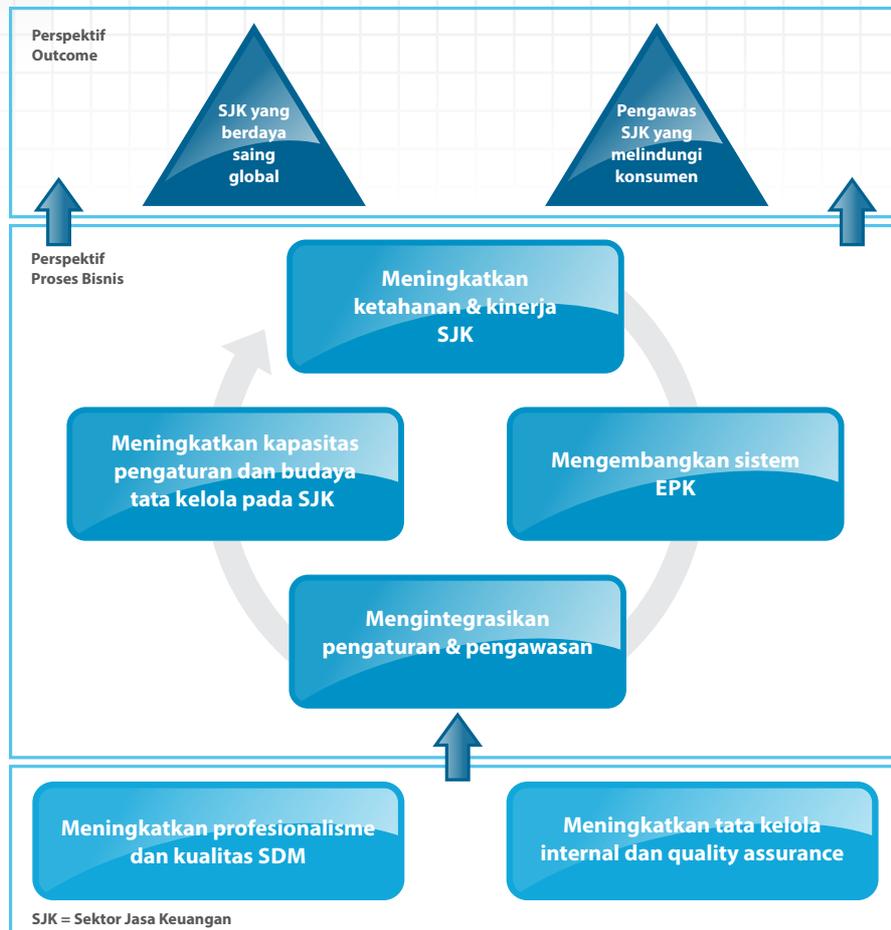
## **Pencapaian Sasaran Strategis & IKU OJK 2013**





## IV. Pencapaian Sasaran Strategis & IKU OJK 2013

### Peta Strategi OJK 2013



**P**erspektif *outcome* pada peta strategi OJK 2013 tercermin dari gambar segi tiga yaitu terciptanya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang berdaya saing global dan terwujudnya pengawasan SJK yang melindungi konsumennya.

Sedangkan pada perspektif proses bisnis, sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan ketahanan dan kinerja SJK. Ketahanan dan kinerja SJK dapat terwujud apabila didukung oleh peningkatan kapasitas pengaturan, budaya tata kelola pada SJK, dan adanya integrasi pengaturan dan pengawasan SJK. Selain itu pada tahun 2013 OJK diharapkan sudah membangun sistem atau layanan untuk peningkatan aspek edukasi dan perlindungan konsumen.

Pencapaian *outcome* dan proses bisnis tersebut akan dapat dicapai apabila didukung oleh peningkatan profesionalisme dan kualitas SDM dan meningkatnya tata kelola internal serta *quality assurance* OJK secara keseluruhan.

## IV. Pencapaian Sasaran Strategis & IKU OJK 2013

### Sasaran Strategis (SS) & Indikator Kinerja Utama (IKU)

#### Sasaran Strategis

#### Indikator Kinerja Utama

1

**Integrasi pengaturan & pengawasan lembaga keuangan**

- 1.1. Persentase peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank yang telah diharmonisasi dan dikonversi
- 1.2. Target jadwal penyelesaian draf Mekanisme Pengawasan Konglomerasi Keuangan

2

**Peningkatan kapasitas pengaturan & pengawasan**

- 2.1. Persentase hasil kajian pendukung peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank
- 2.2. Persentase pelaksanaan pemeriksaan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank terhadap rencana pemeriksaan yang ditetapkan

3

**Penguatan ketahanan & kinerja SJK**

- 3.1. Persentase jumlah kebijakan yang mendorong peningkatan akses bagi perusahaan ke pasar modal sesuai rencana
- 3.2. Persentase penyelesaian pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sesuai target waktu yang ditetapkan

4

**Peningkatan stabilitas sistem keuangan**

- 4.1. Persentase terselenggaranya rapat koordinasi Kementerian Keuangan dan OJK dalam rangka harmonisasi kebijakan fiskal serta Bank Indonesia dan OJK dari harmonisasi kebijakan moneter & sektor jasa keuangan.

## IV. Pencapaian Sasaran Strategis & IKU OJK 2013

### Sasaran Strategis

5

Peningkatan budaya tata kelola & manajemen risiko di lembaga keuangan

6

Pengembangan sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi serta edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif

7

Peningkatan profesionalisme SDM

8

Peningkatan tata kelola internal dan *quality assurance*

### Indikator Kinerja Utama

5.1. Persentase penyelesaian uji kepatutan dan kelayakan terhadap pengurus dan pemegang saham

6.1. Jumlah edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif  
6.2. Persentase penyelesaian desain *Financial Customer Care* yang terintegrasi.

7.1. Persentase penyelesaian *Grand Design* Sumber Daya Manusia dan *Training Need Analysis* OJK

8.1. Persentase ketepatan waktu penyempurnaan *Grand Design* Organisasi OJK  
8.2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pengembangan Sistem Manajemen Strategi dan Pengelolaan Kinerja OJK  
8.3. Persentase ketepatan waktu penyelesaian penyusunan rencana kerja dan anggaran OJK tahun 2014  
8.4. Persentase penyusunan pedoman audit dan manajemen risiko terhadap rencana yang ditetapkan  
8.5. Persentase penyelesaian target integrasi teknologi informasi

## IV. Pencapaian Sasaran Strategis & IKU OJK 2013

### Capaian Kinerja OJK 2013



1. Pertama, program strategis pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara terintegrasi antar subsektor keuangan. Dalam konteks ini, OJK telah menyusun (i) usulan struktur organisasi, kerangka dan metodologi, pedoman, Standar Prosedur Operasional (SPO), mekanisme kerja, serta

sistem informasi pengawasan terintegrasi; (ii) konsep Peraturan Dewan Komisioner mengenai Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Terintegrasi; (iii) konsep mekanisme koordinasi pengawasan terintegrasi yang mengatur cakupan koordinasi antar sektor pengawasan jasa keuangan; (iv) konsep forum komunikasi dan harmonisasi pengawasan terintegrasi; (v) konsep komite pengawasan terintegrasi yang membahas mengenai permasalahan strategis dalam pengawasan terintegrasi; dan (vi) pengembangan *dashboard* peta konglomerasi keuangan melalui penyusunan *blueprint* sistem informasi dan pelaporan terintegrasi, dan kerangka pelaporan dan perijinan IKNB terintegrasi.

2. Kedua, meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan, untuk mencapai pengaturan dan pengawasan yang lebih efektif, mampu mengidentifikasi secara dini permasalahan di sektor jasa keuangan termasuk kemungkinan cara penyelesaiannya. Selama tahun 2013, OJK telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengaturan menyeluruh terhadap pasar modal dan IKNB.
3. Ketiga, program penguatan ketahanan dan kinerja sistem keuangan yang dimaksudkan untuk menciptakan sektor jasa keuangan di Indonesia yang lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik yang disebabkan situasi global maupun domestik. Dalam hal penegakan hukum yang lebih agresif dan komprehensif, OJK aktif meningkatkan kualitas dan kuantitas penegak hukum di bidang pasar modal melalui rangkaian pelatihan dan pendidikan selain juga melakukan koordinasi dengan institusi penegak hukum.



#### IV. Pencapaian Sasaran Strategis & IKU OJK 2013

4. Keempat, menjalankan fungsinya menjaga dan meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) OJK aktif melakukan koordinasi bersama otoritas terkait dalam Forum Komunikasi SSK (FKSSK) . Saat ini OJK juga tengah mengembangkan kerangka dan model *stress test* untuk industri keuangan yang meliputi Perusahaan Pembiayaan dan Asuransi.
5. Kelima, dalam rangka meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan, OJK telah melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) untuk jajaran pengurus dan pimpinan di sektor IKNB. Selama triwulan laporan, OJK telah menerima 620 permohonan melakukan uji kemampuan dan kepatutan di IKNB dengan tingkat penyelesaian kumulatif 97 %.
6. Keenam, dalam menjalankan amanat perlindungan konsumen, OJK membentuk sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi serta sosialisasi yang masif dan komprehensif. Sampai dengan saat ini, OJK melalui FCC telah memberikan 7.655 layanan kepada konsumen dan masyarakat dengan rincian layanan permintaan informasi sebanyak 6.271 dengan tingkat penyelesaian 93,10%, layanan pengaduan konsumen sebanyak 889 dengan tingkat penyelesaian 68,50% dan selebihnya sekitar 495 layanan penyampaian informasi dengan tingkat penyelesaian 90,91%. Saat ini OJK juga tengah menyiapkan *website* mini yang berisi menu informasi dan materi edukasi keuangan yang dapat diakses pada pertengahan triwulan IV tahun 2013 bersamaan dengan peluncuran *website* OJK yang baru. Dalam upaya perlindungan konsumen OJK juga tengah menyiapkan dua rancangan kebijakan terkait penyelesaian sengketa nasabah yaitu rancangan POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan rancangan PDK tentang Mekanisme Pengajuan Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Kepentingan Konsumen. Untuk program strategis penyusunan *blueprint* Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) sudah diluncurkan pada bulan November 2013 disertai dengan penyampaian hasil survei literasi keuangan tahun 2013. Pada bulan Juli, OJK juga telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.



Selain itu OJK juga melakukan upaya pemberian informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan

#### IV. Pencapaian Sasaran Strategis & IKU OJK 2013

melalui berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan lapisan masyarakat disamping meluncurkan majalah "Edukasi Konsumen" yang terbit setiap triwulan dan menerbitkan "buku saku" tentang pengenalan OJK, program EPK, pengenalan produk dan jasa keuangan, serta perencanaan keuangan.

7. Ketujuh, OJK juga menyadari pentingnya peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. Pengembangan SDM OJK difokuskan pada peningkatan kompetensi yang terencana dan menumbuhkan motivasi SDM untuk dapat berkontribusi lebih baik kepada OJK. Selain pelatihan-pelatihan OJK telah merancang *Leadership Development Program* dan menyiapkan Program Pengenalan Untuk Calon Pegawai dari program rekrutmen OJK.
8. Kedelapan, OJK terus melakukan pengembangan konsep kerja fungsi asuransi yang terintegrasi (*integrated assurance*), peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan pengaturan dan sistem fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas. Selama tahun 2013, kami juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan uji publik atas *Risk Maturity Assessment: Standard and Guideline* yang dilakukan pada 11 institusi yang mewakili berbagai sektor industri dan regulator di Australia. Selama tahun 2013, pengembangan infrastruktur fungsi audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas dilakukan melalui kegiatan penyusunan konsep *Standard Operating Procedures (SOP)* Audit Internal OJK. Sementara pelaksanaan tugas dan fungsi audit internal, manajemen risiko dan pengendalian kualitas berfokus pada beberapa hal yaitu : (i) On-site Audit Internal pada beberapa satuan kerja; (ii) Review Neraca Awal Laporan Keuangan OJK per 1 Januari 2013 dan beberapa laporan kritikal lainnya; (iii) mengidentifikasi risiko dalam pelaksanaan pengalihan tugas dan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK; (iv) menyusun Profil Risiko OJK-Wide; (v) Review tata persuratan internal dalam rangka penguatan proses bisnis dan penerapan proses *rule making rule*; dan (vi) koordinasi dengan Tim Transisi OJK sehubungan dengan pemantauan perkembangan Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank ke OJK khususnya terkait *governance, risk, control, and quality*; (vii) Terkait dengan penguatan internal OJK, beberapa kebijakan yang telah diputuskan dalam RDK antara lain mengenai Penataan Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Penerapan 9 Level Jabatan; Nomenklatur Jabatan; Konversi Grading dan Level Jabatan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, ditetapkan pula pemenuhan SDM OJK baik yang berasal dari rekrutmen umum maupun dari internal OJK serta penyusunan Laporan Keuangan OJK. Selanjutnya, penegakan *governance* OJK tercermin pada diputuskannya ketentuan mengenai Tata Tertib dan Disiplin Pegawai OJK dan pembentukan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowing system*) di Otoritas Jasa Keuangan (SPP-OJK).



## IV. Pencapaian Sasaran Strategis & IKU OJK 2013

### Anggaran

Upaya maksimal seluruh jajaran pegawai dan pejabat Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan tugas pokok yang telah diamanatkan tercermin dalam realisasi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2013, yang meningkat sebesar 75,32% dibandingkan realisasi anggaran pada Triwulan III Tahun 2013.

Jika pada periode Triwulan III realisasi anggaran baru mencapai 36,35%, maka pada Triwulan IV pencapaian realisasi mencapai 63,73% dari anggaran sebesar Rp1.645.293.987.000.

Peningkatan signifikan terjadi dikarenakan antara lain; proses penyusunan ketentuan biaya telah selesai disiapkan, proses pengadaan di bidang sistem informasi dan logistik telah selesai untuk pelaksanaan pekerjaan dan realisasi pembayaran serta proses rekrutmen pegawai baru telah berhasil diselesaikan. Disamping itu, proses pendampingan oleh Direktorat Keuangan kepada Satker-Satker dalam merealisasikan anggaran, memberikan andil yang cukup signifikan dalam proses persiapan dan penyelesaian pembayaran yang dilakukan satker-satker.

Peningkatan realisasi yang signifikan tersebut, dirasa masih dapat ditingkatkan lagi bila:

1. Realisasi yang berkaitan dengan remunerasi seperti realisasi asuransi kesehatan, imbalan prestasi kerja dan pembentukan dana pensiun tidak sepenuhnya dilaksanakan pada Tahun 2013.
2. Proses pengadaan beberapa sarana dan prasarana tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2013.
3. Terdapat efisiensi anggaran pada pelaksanaan aktivitas atau tugas OJK termasuk efisiensi anggaran pertemuan/rapat, sosialisasi, *workshop*, dan perjalanan dinas yang dilakukan secara swakelola namun demikian target kinerja telah tercapai.

### Perbandingan Anggaran dan Realisasi

Uraian	31 Maret 2013	30 Juni 2013	30 September 2013	31 Desember 2013
Anggaran	1.689.093.057.000	1.645.293.987.000	1.645.293.987.000	1.645.293.987.000
Realisasi	73.026.064.867	200.191.563.703	598.099.951.465	1.048.593.391.576
%	4,32	12,17	36,35	63,73

Untuk Tahun 2014, agar penyerapan anggaran terealisasi secara optimal, akan dilakukan monitoring dan pengawasan realisasi secara ketat sekaligus disertai dengan peningkatan kemampuan pengetahuan satker-satker mengenai ketentuan realisasi anggaran serta penyempurnaan sistem aplikasi keuangan OJK yang lebih komprehensif.

## IV. Pencapaian Sasaran Strategis & IKU OJK 2013

### Capaian Kinerja OJK 2013 (DALAM ANGKA)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	%Capaian
1.1. Persentase peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank yang telah diharmonisasi dan dikonversi	80%	100%
1.2. Target jadwal penyelesaian draf Mekanisme Pengawasan Konglomerasi Keuangan	100%	100%
2.1. Persentase hasil kajian pendukung peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank	100%	100%
2.2. Persentase pelaksanaan pemeriksaan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank terhadap rencana pemeriksaan yang ditetapkan	100%	100%
3.1. Persentase jumlah kebijakan yang mendorong peningkatan akses bagi perusahaan ke pasar modal sesuai rencana	100%	100%
3.2. Persentase penyelesaian pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sesuai target waktu yang ditetapkan	77%	100%
4.1. Persentase terselenggaranya rapat koordinasi Kementerian Keuangan dan OJK dalam rangka harmonisasi kebijakan fiskal serta Bank Indonesia dan OJK dalam rangka harmonisasi kebijakan moneter, dan sektor jasa keuangan.	100%	100%
5.1. Persentase penyelesaian uji kepatutan dan kelayakan terhadap pengurus dan pemegang saham	100%	100%

## IV. Pencapaian Sasaran Strategis & IKU OJK 2013

### Capaian Kinerja OJK 2013 (DALAM ANGKA)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target	%Capaian
6.1. Jumlah edukasi (EPK) dan sosialisasi (DKHI) yang masif dan komprehensif	100%	100%
6.2. Persentase penyelesaian disain <i>Financial Customer care</i> yang terintegrasi.	100%	100%
7.1. Persentase penyelesaian <i>Grand Design</i> Sumber Daya Manusia dan <i>Training Need Analysis</i> OJK	100%	100%
8.1. Persentase ketepatan waktu penyempurnaan <i>Grand Design</i> Organisasi / Implementasi Penataan Organisasi OJK sesuai dengan strategi	100%	100%
8.2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pengembangan Sistem Manajemen Strategi dan Pengelolaan Kinerja OJK	100%	100%
8.3. Persentase ketepatan waktu penyelesaian penyusunan rencana kerja dan anggaran OJK tahun 2014	100%	100%
8.4. Persentase penyusunan pedoman audit dan manajemen resiko terhadap rencana yang ditetapkan	100%	100%
8.5. Persentase penyelesaian target integrasi teknologi informasi	100%	100%

## IV. Pencapaian Sasaran Strategis & IKU OJK 2013

### Capaian Kinerja Lainnya

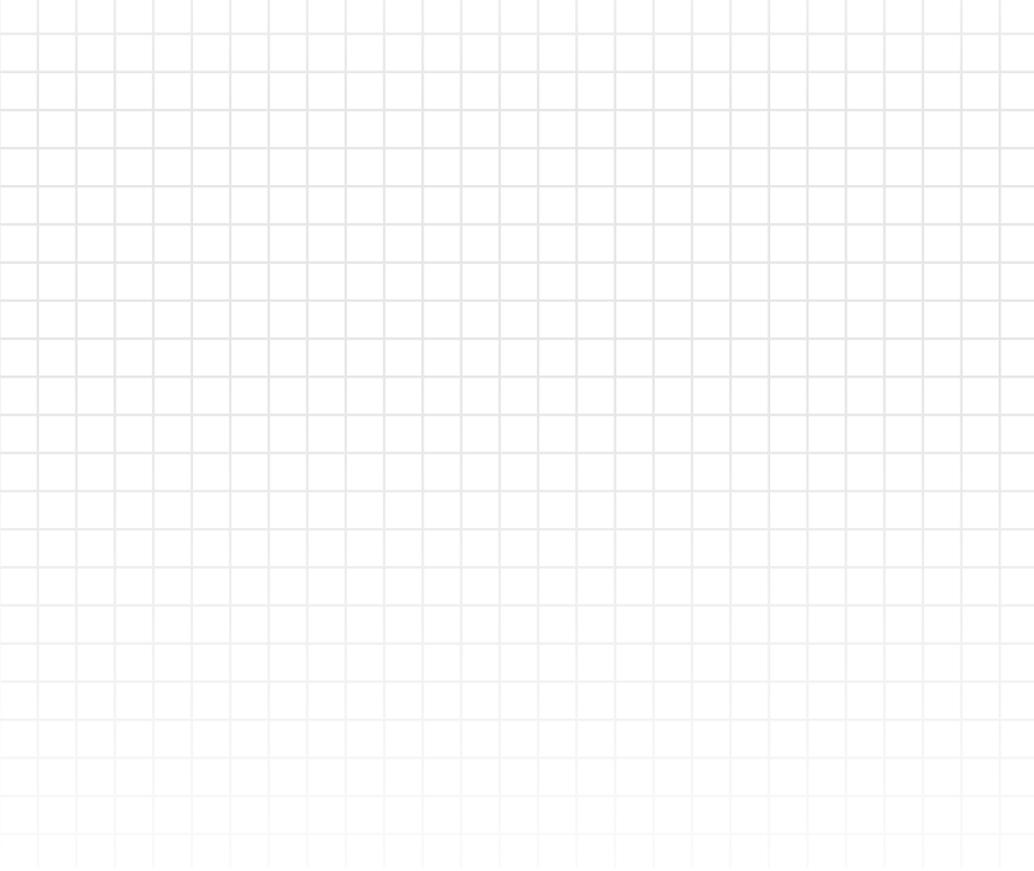
Selain capaian SS & IKU OJK sebesar 100,75% tersebut, terdapat berbagai *achievement* lain yg cukup signifikan untuk periode transisi (konsolidasi internal) saat ini, yg mencakup aspek manajemen internal & tata kelola, namun tidak tercakup dalam SS & IKU OJK, antara lain:

- a. Manajemen Strategi: implementasi Sistem MSAK yaitu perumusan DS OJK 2017 & SM OJK 2014 dan operasionalisasi/*cascading*
- b. Organisasi: implementasi ketentuan organisasi antara lain struktur organisasi & pendelegasian wewenang; penyusunan nilai strategis & pelaksanaan program internalisasinya.
- c. SDM: implementasi ketentuan SDM antara lain rekrutment pegawai baru & PKWT, pendidikan pegawai dan sistem SDM lainnya.
- d. TI/SI: penyediaan layanan *e-mail*, *intranet*, *ekstranet* & *internet* OJK; pengalihan Sistem Informasi (SI) pengawasan perbankan dari BI ke OJK di Kantor Pusat (KP) & seluruh Kantor Regional (KR)/Kantor OJK (KOJK) di daerah.
- e. Logistik: pengadaan gedung & ruang kerja serta alat transport di KP & seluruh KR/KOJK di daerah.
- f. Keuangan: penetapan standar akuntansi & pelaporan keuangan OJK, pengembangan Sistem & Aplikasi Keuangan serta ketentuan pendukungnya.
- g. Governance: pelaksanaan strategi AIMRPK, penerbitan laporan kegiatan berkala OJK dalam rangka akuntabilitas (Laporan Triwulanan OJK)
- h. Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan

Berdasarkan SS & IKU OJK tersebut di atas, dengan mengukur capaian kinerja dan anggaran 2013 maka Nilai Kinerja OJK Wide 2013 adalah sebesar 100,75%. Perhitungan rinci kinerja SS dan IKU sebagaimana bab XI.

IV. Pencapaian Sasaran Strategis  
& IKU OJK 2013







# V

## Pengaturan & Pengawasan Bidang Pasar Modal

Flight	From	Hall	Status	Time
K 415	Seoul/ICN	B	Est at	01:35
629	Seoul/ICN	A	Est at	22:00
6802	Kota Kinabalu	A	At gate	18:05
917	Taipei	A	At gate	17:47
278	Paris	B	At gate	18:30
722	Kuala Lumpur	B	Est at	19:50
384	Dubai	A	At gate	18:00
761	Kunming	B	At gate	18:25

Time	Flight	From	Hall	Status
18:05	UA 889	Boston	B	Landed
18:10	US 6524	San Francisco		
18:10	KA 893	Shanghai	B	At gate
18:10	KA 951	Qingdao	A	At gate
18:10	UO 657	Okinawa	A	At gate
18:15	3U 8779	Chengdu	A	At gate
18:15	ET 603	Addis Ababa	A	Est at
18:20	AE 1821	Tai Chung	B	At gate

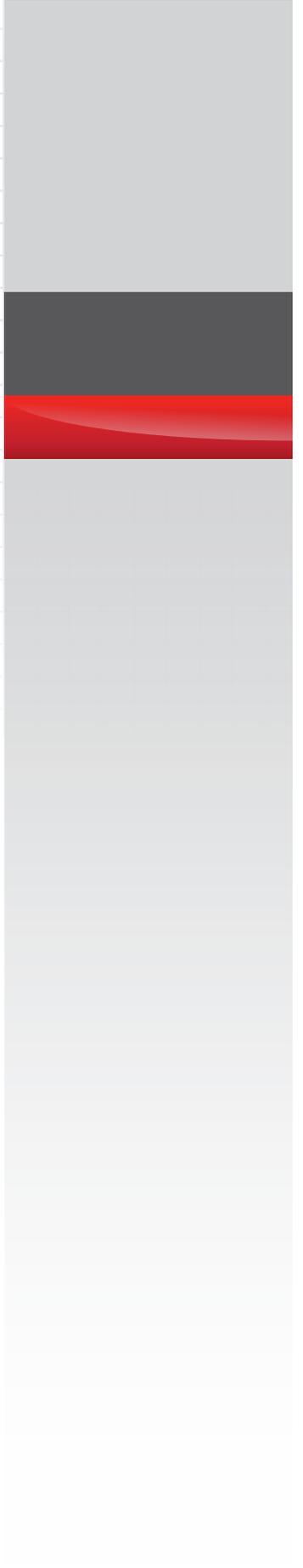
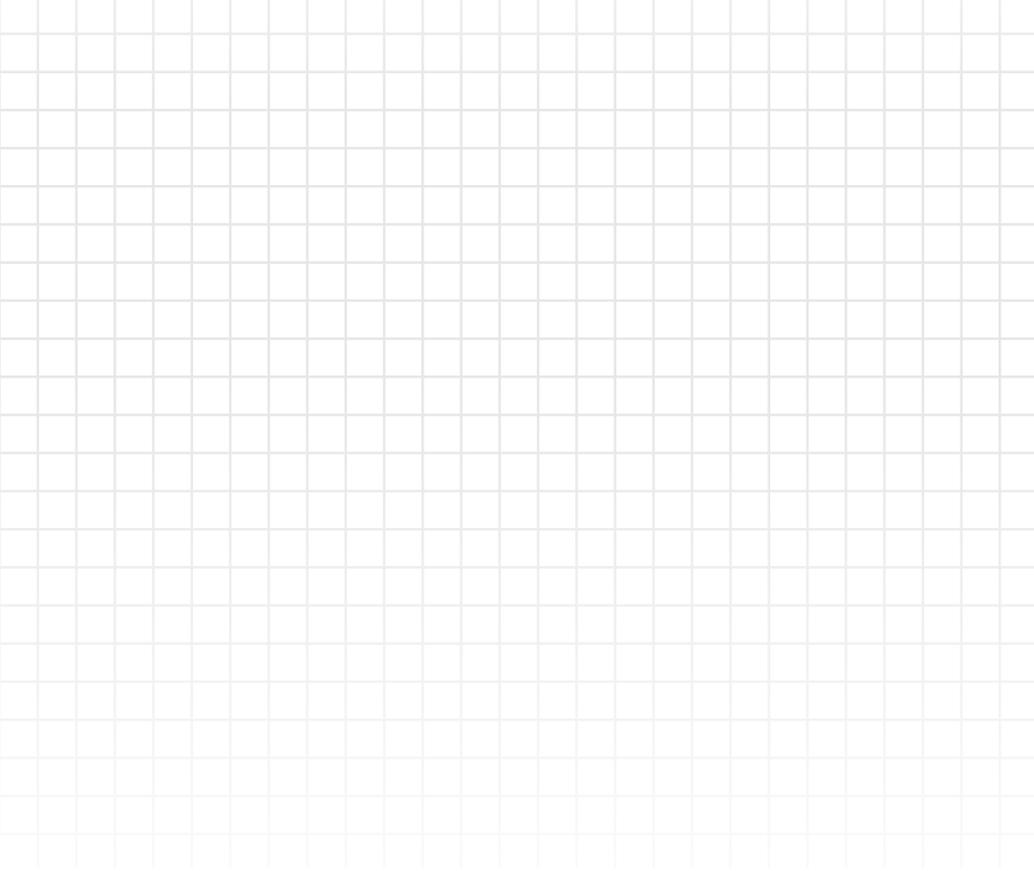
Time	Flight	From	Hall	Status
18:50	SQ 872	Singapore	A	Est at
19:00	CA 115	Beijing	A	Est at
	KA 1115			
19:00	CX 931	New York/JFK	B	At gate
	AA 6091			
19:00	CX 879	San Francisco	B	At gate
	AA 6079			
19:05	CO 099	Newark	A	Est at

Time	Flight	From	Hall	Status
18:20	BR 871	Taipei	A	At gate
18:20	CI 919	Taipei	A	At gate
18:20	CZ 3031	Guilin	A	At gate
18:30	FM 509	Shanghai	A	At gate
18:40	5J 118	Manilla	B	At gate
18:45	CA 427	Chengdu	A	At gate
	KA 1427			
18:45	CI 642	Bangkok	B	At gate

Time	Flight	From	Hall	Status
19:05	KA 841	Chongqing	B	Est at
	CX 6849			
19:05	CX 6859	Shanghai	B	Est at
19:10	UO 262	Shantou		Cancelled
19:15	DL 027	Boston	A	Est at
19:30	3K 995	Singapore	A	Est at
19:30	UO 122	Guilin	A	Est at
19:30	KA 2371	Okinawa	A	Est at



## V. Pengaturan & Pengawasan Bidang Pasar Modal

**P**engaturan dan pengawasan diperlukan dalam rangka mendukung pertumbuhan industri yang semakin pesat dan dinamis. Tujuannya adalah memberi kepastian hukum serta memastikan pertumbuhan industri tetap terjaga. Pengaturan yang telah dikeluarkan terkait pengelolaan investasi, transaksi dan lembaga efek, emiten dan perusahaan publik, pasar modal syariah, sanksi dan konversi peraturan Bapepam LK menjadi Peraturan OJK (POJK). Sementara bidang Pengawasan mencakup perdagangan efek, SRO dan LPHE, perusahaan efek, pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik, pasar modal syariah, dan lembaga profesi dan penunjang.



Pada triwulan III tahun 2013 sempat terjadi gejolak di pasar keuangan akibat isu *tapering off* dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan bersama di Forum Komunikasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), OJK menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk *buyback* saham yang bertujuan meningkatkan kembali nilai saham dan menguatkan Pasar Modal Indonesia.

## V. Pengaturan & Pengawasan Bidang Pasar Modal

### Perkembangan Penawaran Umum Saham Perdana, Right Issue, Obligasi/Sukuk Korporasi & PUB

Jenis Penawaran	2010		2011		2012		2013 ( per Des'13 )	
	Nilai	Emiten	Nilai	Emiten	Nilai	Emiten	Nilai	Emiten
IPO Saham	29,56	23	19,70	25	10,35	24	16,73	30
Right Issue	48,67	31	39,79	25	19,75	22	40,81	31
Obligasi Korporasi/ Sukuk*	36,60	26	46,46	39	87,15	62	57,50	50
<b>Total</b>	<b>114,83</b>	<b>80</b>	<b>105,95</b>	<b>88</b>	<b>117,25</b>	<b>108</b>	<b>115,04</b>	<b>111</b>

(Nilai dalam Triliun Rupiah)

Pipeline Penawaran Umum 31 Desember 2013		
Jenis Efek	Jumlah Pipeline	Nilai Indikatif ( Rp Miliar )
IPO Saham	1	53,14
Right Issue	1	2.022,33
Obligasi Korporasi / Sukuk*	4	2.600,00
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>4,675,47</b>

\* IPO obligasi korporasi/sukuk sebanyak 11, PUB Obligasi tahap I sebanyak 20, PUB Obligasi tahap II dan seterusnya sebanyak 19 Emiten.

Pasar Modal Indonesia semakin berkembang baik dari jumlah emiten maupun nilai perusahaan yang mengeluarkan *Initial Public Offering* (IPO), *Right Issue* maupun Obligasi.

## V. Pengaturan & Pengawasan Bidang Pasar Modal

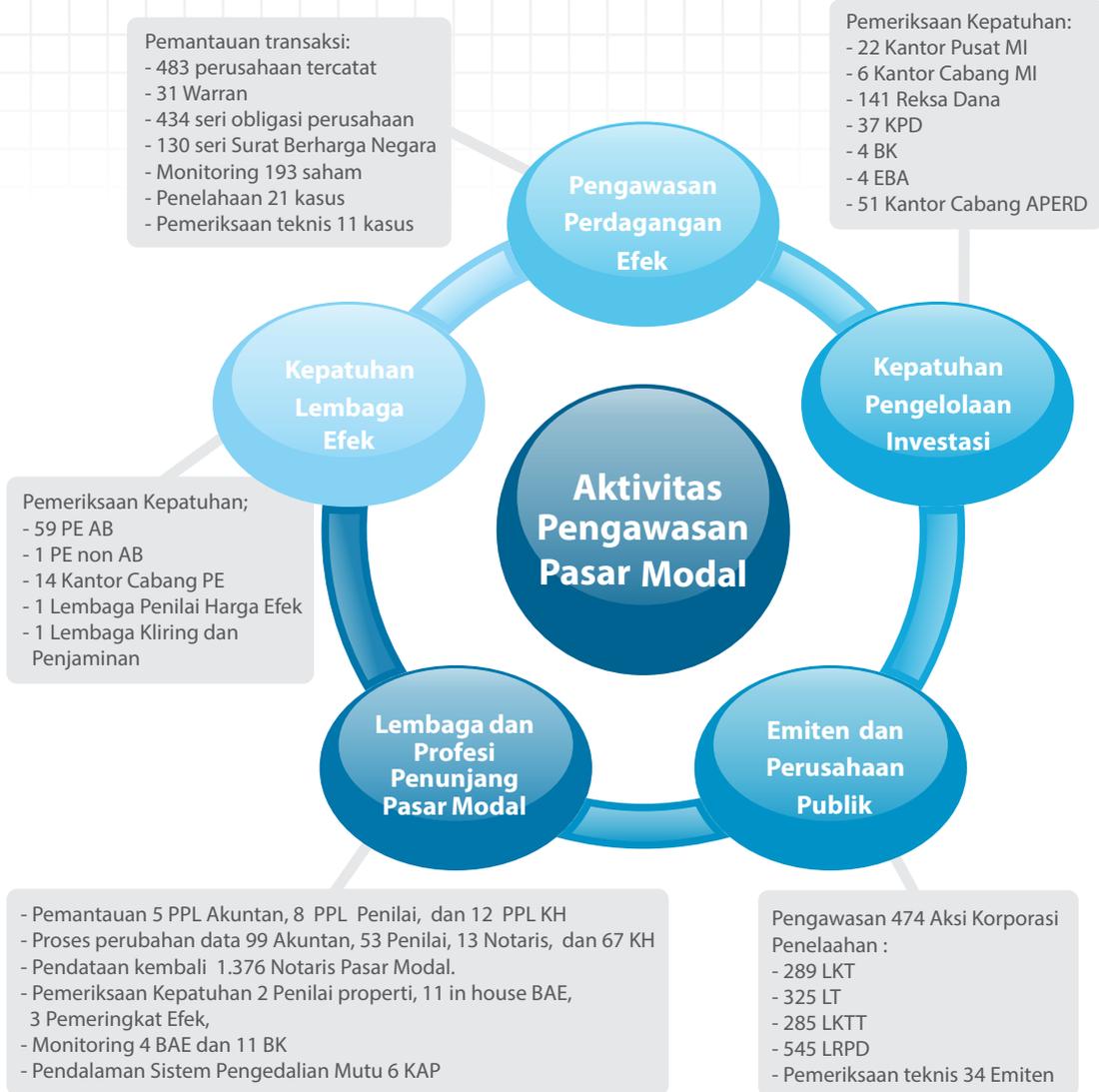
### Perkembangan Pemberian/pencabutan Ijin Lembaga Efek, Wakil Perusahaan Efek, Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal, serta Pelaku Pasar Modal Lainnya

No	Jenis Izin/ Pendaftaran	2013		Jumlah Izin	No	Jenis Izin/ Pendaftaran	2013		Jumlah Izin
		Penerbitan Izin	Pencabutan Izin Usaha				Penerbitan Izin	Pencabutan Izin Usaha	
<b>Perusahaan Efek</b>					<b>Perusahaan Efek</b>				
1	Perantara Pedagang Efek (PPE)	1	2	41	11	Akuntan	26	7	567
2	Penjamin Emisi Efek (PEE)	4	1	18	12	Penilai	10	1	161
3	PPE & PEE	-	-	74	13	K. Hukum	17	-	709
4	PPE & Manajer Investasi (MI)	-	-	2	14	Notaris	98	-	1.724
5	PPE & PEE & MI	1	-	5	15	Pemeringkat Efek	-	-	3
6	Manajer Investasi	3 1*)	2	75	16	Wali Amanat	-	-	11
*) pengaktifan izin usaha					17	BAE	-	-	10
<b>Perusahaan Efek</b>					18	BAE (in-house)	-	-	11
7	Wakil Penjamin Emisi Efek (WPPE)	50	-	1.883	19	Bank Kustodian	1	-	22
8	Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)	498	-	7.392	20	Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE)	-	-	11
9	Wakil Agen Penjual Efek RD (WAPERD)	1.978	-	18.106	<b>Pelaku Pasar Modal Lainnya</b>				
10	Wakil Manajer Investasi	158	-	2.437	20	Penasihat Investasi: • Perorangan • Institusi	-	-	2
							-	-	5
					19	APERD	-	1	22

OJK turut serta mendukung pertumbuhan industri yang pesat dengan menerbitkan izin bagi perusahaan/lembaga yang berkecimpung di pasar modal dan senantiasa menjaga dinamika industri dengan kepastian hukum melalui pencabutan izin bagi yang melanggar peraturan.

## V. Pengaturan & Pengawasan Bidang Pasar Modal

### Pelaksanaan Pengawasan Pasar Modal



NOTE: PE: Perusahaan Efek; AB: Anggota Bursa; MI: Manajer Investasi; PPL: Pendidikan Profesi Lanjutan; BK: Bank Kustodian; BAE: Biro Administrasi Efek; KH: Konsultan Hukum; KAP: Kantor Akuntan Publik; EBA: Efek Beragun Aset; APERD: Agen Penjual Reksa Dana; LKT: Laporan Keuangan Tahunan; LT: laporan Tahunan; LKTT: Laporan Keuangan Tengah Tahunan; LRPD: Laporan Realisasi Penggunaan Dana

## V. Pengaturan & Pengawasan Bidang Pasar Modal

A. Pada tahun 2013, di bidang Pasar Modal, OJK telah menerbitkan:

Peraturan tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan;

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

- Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Melaksanakan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan.
- Kriteria Pernyataan Tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal yang Hilang, dalam rangka penggunaan Dana Perlindungan Pemodal.

B. Penyusunan peraturan dalam rangka mendukung pengembangan Pasar Modal dan memenuhi standar internasional.

Selain itu bidang Pasar Modal juga melakukan beragam kegiatan terkait pengaturan di bidang Pasar Modal yaitu:

1. Penyusunan dan Revisi Peraturan terkait Pengelolaan Investasi
2. Penyusunan dan Revisi Peraturan Transaksi dan Lembaga Efek
3. Kegiatan kajian, Penyusunan dan Revisi Peraturan terkait Emiten dan Perusahaan Publik
4. Kajian, Penyusunan dan Revisi Peraturan terkait Pengaturan Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Syariah
5. Kegiatan kajian, Penyusunan dan Revisi Peraturan terkait Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
6. Penyusunan Peraturan terkait Sanksi
7. Pemrosesan Rancangan Peraturan *Self Regulatory Organization (SRO)*



## V. Pengaturan & Pengawasan Bidang Pasar Modal

### Penegakan Hukum di bidang Pasar Modal

Kegiatan	Perihal Penanganan	Jumlah	Keterangan
Pemeriksaan Kasus	- Kasus terkait Emiten atau Perusahaan Publik	19	
	- Kasus terkait dengan Transaksi dan Lembaga Efek	14	
Penaan Sanksi Admisitratif	- Pelanggaran Non Keterlambatan	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Peringatan tertulis</li> <li>• 23 sanksi denda</li> <li>• 1 beku izin WPPE</li> </ul>
	- Pelanggaran keterlambatan laporan	917	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 853 Peringatan tertulis</li> <li>• 64 sanksi denda</li> </ul>
	- Surat Teguran keterlambatan pembayaran sanksi denda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 186 Surat Teguran 1</li> <li>• 51 Surat Teguran 2</li> <li>• 19 Surat Pelimpahan ke Panitia Urusan Piutang Negara atas denda tahun 2012 karena macet</li> </ul>	
Penanganan Keberatan atas Sanksi administratif		23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 ditolak,</li> <li>• 2 diterima sebagian,</li> <li>• 1 sedang dalam proses</li> </ul>

Satgas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum Di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

- Satgas dibentuk kembali tgl 26 Juni 2013.
- Jumlah pengaduan/pertanyaan dari masyarakat sampai dengan 27 Des 2013 sebanyak 386 pertanyaan/pengaduan.

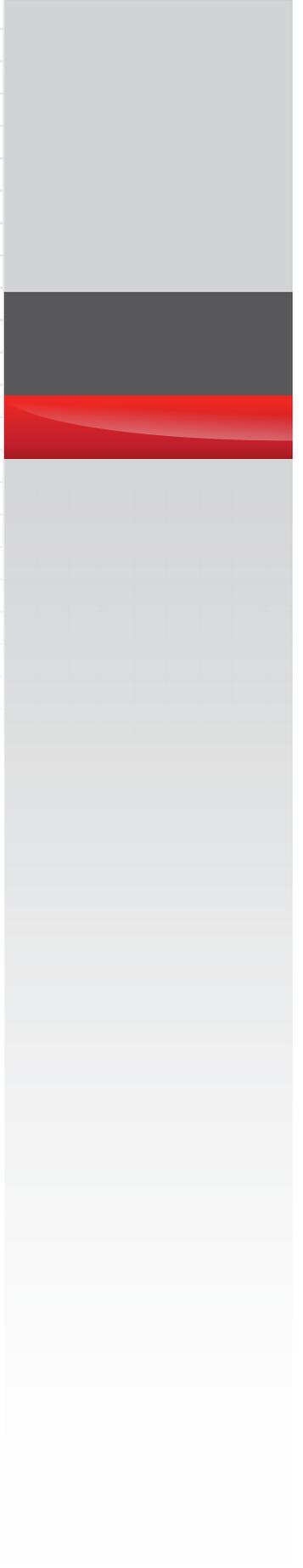
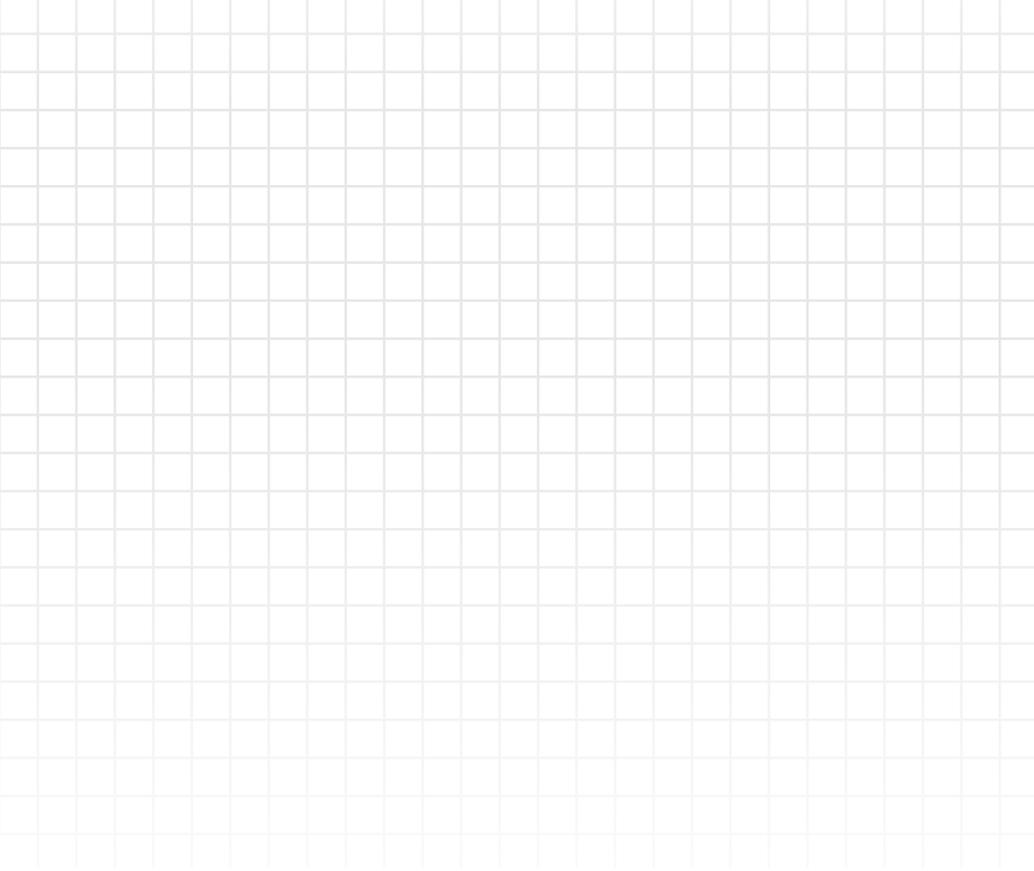
Penegakan hukum di bidang Pasar Modal tetap dilakukan dalam kerangka pembinaan dengan penanaan sanksi yang bertahap dan bertujuan mendidik perusahaan/lembaga. Pihak-pihak terkait pun dapat mengajukan keberatan dan sanggahannya demi menciptakan sistem penegakan hukum yang fair dan adil.

## V. Pengaturan & Pengawasan Bidang Pasar Modal

### Tantangan Pengembangan Pasar Modal Menciptakan Pasar Modal yang Teratur, Wajar dan Efisien



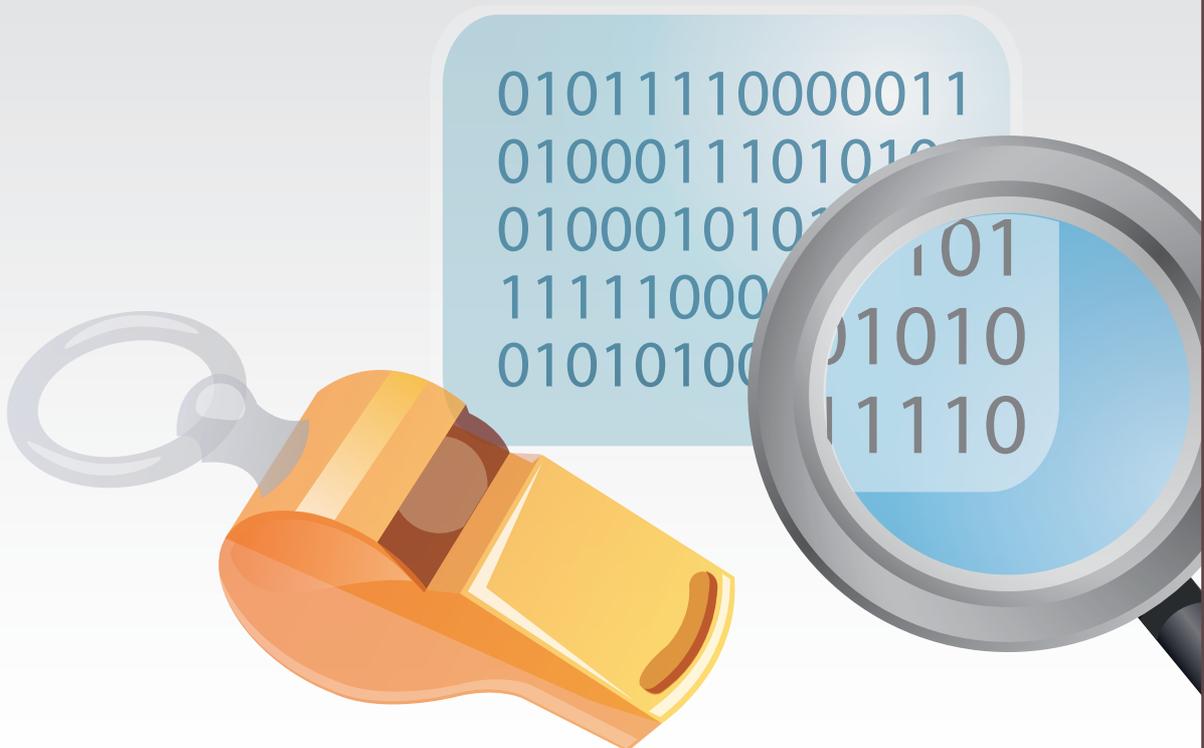
Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia





VI

## Pengaturan & Pengawasan Bidang Industri Keuangan Non Bank



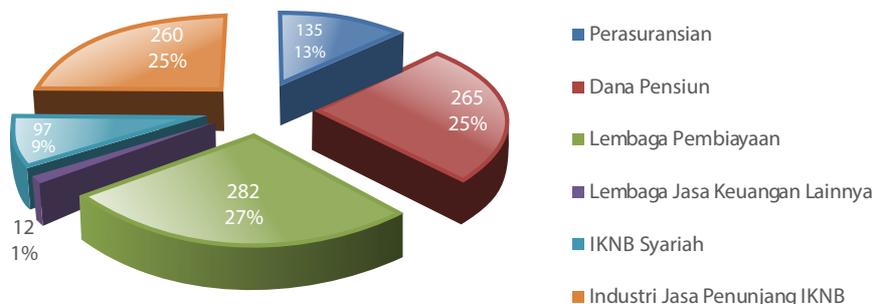


## VI. Pengaturan & Pengawasan Bidang Industri Keuangan Non Bank



pengaturan dan pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) merupakan hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas industri. Pengaturan dan pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku industri melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang ada di dalam sektor jasa keuangan. Saat ini OJK tengah melakukan kajian untuk menyusun RPOJK dan SE OJK tentang IKNB syariah, sistem pengawasan berbasis risiko, dan standar akuntansi terkait konvergensi PSAK ke IFRS bagi industri perasuransian.

### Profil Industri Keuangan Non Bank (Jumlah & ASET IKNB)



### ASET IKNB

Sektor	2011	2012	September 2013
Asuransi	481,75	556,25	616,03
Dana Pensiun	141,80	158,37	161,40
Lembaga Pembiayaan	291,38	330,39	387,16
LJKL	65,97	80,46	91,62
IKNB Syariah	13,50	35,80	41,39
Lembaga Penunjang	2,43	3,49	3,60
<b>TOTAL</b>	<b>996,83</b>	<b>1.164,76</b>	<b>1.301,21</b>

\* Jumlah dan aset per-september 2013

Industri Keuangan Non Bank (IKNB) jumlahnya didominasi oleh lembaga pembiayaan, dana pensiun, asuransi dan lainnya. Walaupun secara aset perusahaan asuransi mendominasi hampir separuh aset sektor jasa keuangan IKNB.

Dari tahun 2011 hingga September 2013 industri di IKNB mengalami pertumbuhan yang pesat sebesar rata-rata 14,28% per tahun. Jauh di atas pertumbuhan nasional yang rata-rata sekitar 6% per tahun.

## VI. Pelaksanaan Pengaturan & Pengawasan Industri Keuangan Non Bank

### Kegiatan pengawasan yang dilakukan di IKNB antara lain:

#### I. Melakukan analisis.

Kegiatan analisis atas laporan periodik yang disampaikan oleh perusahaan guna menilai kepatuhan perusahaan perasuransian pada peraturan yang berlaku, untuk mengidentifikasi adanya risiko awal yang dihadapi oleh IKNB dan menetapkan upaya mitigasinya. Selain itu, OJK mengadakan diskusi pembahasan bersama dengan para eksekutif perusahaan.

#### II. Melakukan pemeriksaan langsung.

Pemeriksaan langsung merupakan pemeriksaan rutin/khusus, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung dan pembinaan dana pensiun, antara lain dalam rangka penyusunan laporan dan penerapan data digital dana pensiun.

Pemeriksaan	Target	Realisasi	%Capaian
Perasuransian	34	39	115%
Dana Pensiun	34	35	103%
Lembaga Pembiayaan	81	92	114%
LJKL	17	19	112%
IKNB Syariah	14	12	86%
Jasa Penunjang	28	28	100%

#### III. Penegakan Hukum di IKNB

Sesuai kewenangannya dan berdasarkan hasil analisis maupun hasil pemeriksaan, OJK telah mengenakan sanksi peringatan kepada perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan perundang-undangan, seperti tidak menyampaikan/terlambat menyampaikan laporan periodik, ketentuan permodalan dan tingkat kesehatan keuangan.

Penegakan Hukum	Surat Peringatan (SP)	Pencabutan SP
Perasuransian	24	39
Dana Pensiun	0	0
Lembaga Pembiayaan	664	640
LJKL	0	0
IKNB Syariah	16	11
Jasa Penunjang	74	13
Pengawasan khusus	3	0
Total	765	701

#### IV. Pengawasan Berbasis Risiko.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah penyusunan konsep pengawasan berbasis risiko dan *in house training*.

#### V. Monitoring Fidusia.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain, memberikan sosialisasi kepada para *stakeholders* terkait pemahaman atas jaminan fidusia, OJK melakukan sosialisasi pendaftaran fidusia online kepada perusahaan pembiayaan dan telah membentuk Tim Monitoring dan Koordinasi Fidusia dengan instansi terkait lainnya/asosiasi/perusahaan pembiayaan.

## VI. Pelaksanaan Pengaturan & Pengawasan Industri Keuangan Non Bank

Penyusunan peraturan di bidang IKNB dilakukan secara bertahap dengan melalui proses yang berjenjang agar peraturan dimaksud memenuhi kaidah *governance*.



Keterangan:

- RPOJK : Rancangan Peraturan OJK
- POJK : Peraturan OJK
- RPDK : Rancangan Peraturan DK OJK
- LJKNB : Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
- RSEOJK : Rancangan Surat Edaran OJK
- SEOJK : Surat Edaran OJK

## VI. Pelaksanaan Pengaturan & Pengawasan Industri Keuangan Non Bank

### Program Pengembangan IKNB 2013 dan 2014

#### Pengembangan IKNB 2013

1. Pengembangan sistem informasi geografis untuk penyiapan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
2. Pengembangan asuransi mikro
3. Pengembangan IKNB Syariah
4. Program 1000 Aktuaris
5. Kapasitas Asuransi dan Reasuransi
6. Pembentukan Badan Rating dan Pengelola Statistik Asuransi
7. Dana Pesangon oleh Dana Pensiun
8. Pengawasan BPJS



#### Pengembangan IKNB 2014

-  **Produk Keuangan Mikro**  
Asuransi Mikro & Lembaga Keuangan Mikro
-  **Industri Syariah**  
Pengembangan Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah
-  **Program Pesangon Pensiunan**  
Pengelolaan Dana Pesangon oleh Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi Jiwa
-  **Operasionalisasi BPJS**  
Koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan BPJS
-  **MEA 2015**  
Penguatan permodalan perusahaan asuransi menjadi Rp100 miliar pada akhir Desember 2014

## VI. Pelaksanaan Pengaturan & Pengawasan Industri Keuangan Non Bank



Menyongsong Dana Pensiun Syariah di Indonesia

Asuransi Mikro Indonesia



Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro



Islamic Finance Conference 2013



## VI. Pelaksanaan Pengaturan & Pengawasan Industri Keuangan Non Bank

### Program Unggulan Pengembangan IKNB

#### 1. Lembaga Keuangan Mikro

- Dalam rangka persiapan pelaksanaan pengawasan OJK ke LKM pada tahun 2015, kegiatan inventarisasi LKM terus dilakukan. Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) LKM dalam proses.
- Koordinasi dengan Pemda, Kemendagri & Kemenkop-UKM dan pihak terkait lainnya akan terus dilakukan.
- Infrastruktur pengawasan dan pelatihan tenaga pengawas (Pemkab/Pemkot) sedang disiapkan.
- Penyelesaian RPP dan RPOJK terkait UU LKM dalam proses.

#### 2. Pengembangan Asuransi Mikro

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan akses produk asuransi oleh masyarakat khususnya menengah ke bawah, telah disusun program pengembangan asuransi mikro. Program tersebut meliputi: penyusunan peraturan terkait produk dan jaringan pemasaran asuransi mikro, pelatihan kepada perusahaan asuransi mikro, pilot project asuransi mikro, penyusunan program public awareness asuransi mikro dan pelaksanaan Micro Insurance Market Place (MIMPI) sebagai upaya mempertemukan *supply* dan *demand* asuransi mikro.

#### 3. Pengembangan IKNB Syariah

Sebagai negara dengan mayoritas muslim, IKNB Syariah memiliki potensi untuk berkembang dengan pesat. Namun, kapasitas IKNB masih sangat kecil dan hingga saat ini belum terdapat rencana induk dalam pengembangan IKNB Syariah.

Untuk itu, telah disusun program pengembangan IKNB Syariah sebagai berikut:

- Penyusunan cetak biru Pengembangan IKNB Syariah.
- Pelaksanaan Seminar Internasional Tentang Pengembangan Jasa Keuangan Syariah.
- Koordinasi dengan berbagai pihak terkait (DSN MUI, Asosiasi Perasuransian Dan Asosiasi Dana Pensiun) untuk membahas isu-isu terkait implementasi IKNB Syariah, seperti perumusan Fatwa Untuk Anuitas Syariah.

#### 4. Program 1000 Aktuaris

Jumlah aktuaris di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan industri IKNB, khususnya asuransi dan dana pensiun. Implementasi MEA tahun 2015, juga perlu diantisipasi masuknya tenaga aktuaris asing ke IKNB secara signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut telah dicanangkan Program 1000 Aktuaris pada tahun 2013 untuk mendorong percepatan jumlah aktuaris.

## VI. Pelaksanaan Pengaturan & Pengawasan Industri Keuangan Non Bank

### Program Unggulan Pengembangan IKNB

#### 5. Kapasitas Asuransi dan Reasuransi

Kapasitas Perusahaan Asuransi untuk menahan risiko sendiri masih belum optimal, sementara Perusahaan Reasuransi Dalam Negeri belum mampu menampung limpahan risiko tersebut. Hal ini mengakibatkan aliran premi ke luar negeri secara signifikan sehingga menimbulkan defisit neraca pembayaran. Untuk itu, peningkatan kapasitas perusahaan Asuransi dan Reasuransi urgent untuk dilakukan.

Kajian terhadap upaya meningkatkan kapasitas asuransi dan reasuransi terus dilakukan, selain itu terus dilakukan pemantauan terhadap perusahaan asuransi yang ditengarai menyumbang defisit cukup besar. Permintaan terhadap rencana bisnis perusahaan asuransi dan reasuransi tahun 2015 dilakukan untuk mendukung penyusunan kajian.

#### 6. Pembentukan Badan Rating dan Pengelola Statistik Asuransi

Badan Rating yang diharapkan berdiri di Indonesia adalah badan rating yang independen dalam melakukan tugas pengumpulan data statistik serta melakukan perhitungan tingkat premi.

Latar Belakang :

Sehubungan dengan kondisi pemasaran produk asuransi, saat ini sedang terjadi persaingan tarif premi yang tidak sehat untuk lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan asuransi properti.

Tujuan :

untuk meningkatkan perlindungan konsumen asuransi. Pengaturan tingkat premi diharapkan dapat menghasilkan tingkat premi yang wajar, cukup dan tidak diterapkan secara diskriminatif.

untuk mengurangi defisit neraca pembayaran ke luar negeri sektor asuransi.

#### 7. Dana Pesangon oleh Dana Pensiun

Latar Belakang:

- Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) menyatakan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan
- DPLK memiliki kapasitas untuk mengelola program pesangon.
- OJK memberikan peluang bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk mengelola dana program pesangon bagi pemberi kerja yang selanjutnya program ini disebut Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP).

## VI. Pelaksanaan Pengaturan & Pengawasan Industri Keuangan Non Bank

### Program 1000 Aktuaris & Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

#### Program 1000 Aktuaris

- Latar Belakang: kebutuhan tenaga aktuaris, khususnya untuk perusahaan asuransi kerugian.
- Telah dibentuk Tim Percepatan Peningkatan Jumlah Aktuaris dengan surat tugas tanggal 20 Juni 2013
- Kegiatan tahun 2013:
  - Peluncuran program 1000 aktuaris tanggal 9 Juli 2013.
  - Kunjungan ke 10 perguruan tinggi.
  - Sosialisasi ke 5 perguruan tinggi.
  - Mempersiapkan program perkuliahan singkat (menunjuk penyelenggara).
  - Menyelenggarakan *workshop* aktuarial bidang asuransi umum untuk angkatan 1 (8x pertemuan, didanai oleh OJK).



#### Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

Jenis Kegiatan	Target	Realisasi
a. Sosialisasi UU LKM	9 Kali Pelaksanaan	16 Kali Pelaksanaan
b. Inventarisasi LKM	Seluruh Wil. Jawa	100%
c. Penyusunan Peta LKM	Seluruh Wil. Jawa	100%



**VII**

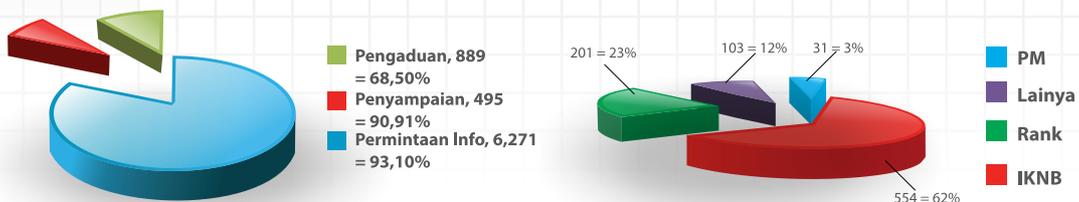
# Edukasi & Perlindungan Konsumen





## VII. Edukasi & Perlindungan Konsumen

### 1. Pelayanan Permintaan Informasi dan Penanganan Pengaduan



Pelayanan konsumen

Pengaduan konsumen dan masyarakat



elama tahun 2013, IFCC OJK telah memberikan 7.655 layanan kepada konsumen dan masyarakat dengan rincian layanan permintaan informasi sebanyak 6.271 dengan tingkat penyelesaian 93,10%, layanan pengaduan konsumen sebanyak 889 dengan tingkat penyelesaian 68,50% dan selebihnya sekitar 495 layanan penyampaian informasi dengan tingkat penyelesaian 90,91%. Khusus untuk layanan pengaduan konsumen, IKNB masih menduduki peringkat pertama dengan 554 aduan (62%) dan perbankan mencapai 201 aduan (23%).

Secara umum, tingkat penyelesaian layanan permintaan informasi mencapai 93,10%, sedangkan pengaduan mencapai 68,50%.



Tempat fasilitasi Pengaduan Konsumen

Dalam upaya penanganan pengaduan konsumen tersebut dikedepankan prinsip keseimbangan, dengan penyelesaian berupa pemberian edukasi kepada konsumen, penyelesaian oleh lembaga jasa keuangan, maupun melalui fasilitasi penyelesaian yang menghasilkan kesepakatan para pihak (konsumen dan lembaga jasa keuangan).

## VII. Edukasi & Perlindungan Konsumen

### 2. Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi (Integrated Financial Customer Care - IFCC) OJK

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah permintaan informasi dan pengaduan konsumen keuangan dan masyarakat ke OJK, maka pengembangan Sistem Pelayanan Konsumen OJK mutlak terus dilakukan, agar dapat memberikan pelayanan yang prima. Pada bulan Desember 2013, IFCC OJK memasuki tahap akhir, ditandai dengan uji coba operasionalisasi IFCC OJK sehingga siap diluncurkan pada awal tahun 2014. Perbedaan utama IFCC OJK ini dengan versi sebelumnya adalah adanya fitur *trackable and traceable*. Fitur *trackable* memungkinkan Lembaga Keuangan mengetahui pengaduan konsumen terkait produk/ layanannya yang masuk ke OJK dan fitur *traceable* memungkinkan konsumen dapat memonitor perkembangan penanganan pengaduan yang telah disampaikan. Untuk memberikan arah strategi pengembangan ke depan, OJK juga telah menyelesaikan penyusunan cetak biru pengembangan IFCC OJK yang mengacu kepada *international best practices* dan mempertimbangkan perkembangan sektor keuangan yang sangat dinamis.

Di samping itu, juga dilakukan penguatan terhadap sarana pendukung pelaksanaan pelayanan konsumen berupa *Knowledge Management System* (berisi informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh *Customer Service Officer* dalam merespon ataupun menjawab pertanyaan masyarakat atau konsumen) dan mini website edukasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan alamat <http://sikapiuangmu.ojk.go.id> (di antaranya berisi informasi lembaga jasa keuangan, pengetahuan produk dan layanan jasa keuangan, dan tips pengelolaan keuangan).



## VII. Edukasi & Perlindungan Konsumen

### 3. Literasi Keuangan & strategi nasional

Dalam rangka penyusunan program edukasi keuangan yang masif dan komprehensif, pada tahun 2013 OJK telah melakukan survei nasional literasi keuangan yang dilakukan di 20 provinsi di wilayah Indonesia dengan melibatkan 8.000 responden (400 responden di setiap Propinsi). Survei ini penting untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat produk dan layanan jasa keuangan (*financial literacy*) sehingga kegiatan edukasi dapat dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.



sehingga kegiatan edukasi dapat dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil survei nasional literasi keuangan pada tahun 2013 di atas, OJK menyusun cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan (SNLK) agar upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis. Disamping itu, SNLK akan menjadi pedoman bagi otoritas di bidang keuangan, bagi lembaga jasa keuangan dan bagi pemangku kepentingan lainnya untuk membekali masyarakat Indonesia dengan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat.

### 4. Program informasi dan edukasi

Program edukasi dilaksanakan secara terstruktur dan terukur serta didukung dengan infrastruktur edukasi yang memadai untuk melakukan kegiatan edukasi untuk semua golongan masyarakat.

Secara umum, target edukasi keuangan adalah kelompok masyarakat yang berpotensi mengoptimalkan pemanfaatan produk dan jasa keuangan dan kelompok masyarakat yang belum memanfaatkan produk dan jasa keuangan. Secara khusus, target edukasi keuangan adalah: (1) Ibu Rumah Tangga; (2) Pelajar; (3) Mahasiswa; (4) Pekerja Formal; (5) Pekerja Informal dan UMKM; dan (6) Pensiunan



## VII. Edukasi & Perlindungan Konsumen

Kegiatan Informasi	Kegiatan Edukasi
1. Survei Nasional Literasi Keuangan	1. Edukasi Masyarakat Umum: 23 Kota
2. Survei Literasi Keuangan - IRT	2. Kuliah Umum: 22 Kampus
3. Mobil Literasi Keuangan (Simolek)	3. Bioskop Keliling: 10 Kota
4. Majalah Edukasi Keuangan	4. Wayang OJK: 6 Kota
5. Booklet Edukasi & Perlindungan Konsumen	5. Edukasi TKI: 7 Kota
6. ILM - Media Elektronik	6. Journalist Class: 4 Kota
7. ILM - Media Cetak	7. Lomba: 2 Event
8. Booth OJK	

Selain penyampaian informasi dan edukasi, OJK juga menyediakan Mobil Literasi Keuangan (Simolek). Simolek akan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah yang selama ini sulit mendapatkan akses informasi dan edukasi jasa keuangan. Fungsi mobil literasi tersebut adalah untuk melayani kelompok-kelompok masyarakat tertentu dalam rangka kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen. Pada tahap awal, jumlah mobil literasi keuangan yang dioperasikan sebanyak 20 unit, dengan penempatan di 5 Kantor Regional (KR) dan 8 Kantor OJK (KOJK).

Terobosan lain untuk mempercepat proses melek keuangan adalah dengan implementasi MoU antara OJK dengan universitas dalam bentuk KKN Tematik. KKN Tematik memobilisasi mahasiswa yang terjun ke daerah untuk mendukung program edukasi keuangan dan menginisiasi program pemberdayaan dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat.



## VII. Edukasi & Perlindungan Konsumen

Diagram Strategi NLK



Pilar yang pertama yaitu Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness*, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai Literasi Keuangan serta mengubah pola pikir dan perilaku keuangan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Pilar Kedua, yaitu Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan. Pilar ini diperlukan untuk memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye nasional keuangan serta memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi literasi keuangan. Dengan infrastruktur yang baik, program literasi keuangan akan berlangsung secara berkesinambungan.

Pilar Ketiga, yaitu Pengembangan Produk dan Layanan Jasa Keuangan. Pilar ini penting untuk mendorong lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa keuangan, dan memperluas jangkauan area layanan jasa keuangan.

Produk-produk untuk mempercepat dan mendukung program literasi keuangan yang dilakukan selama 2013 antara lain: seminar internasional, pembuatan iklan layanan masyarakat, pembuatan video dan pencetakan buku literasi keuangan serta program lainnya untuk mendukung terlaksananya edukasi dan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia.





VIII

# Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari BI ke OJK



BANK INDONESIA



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



## VIII. Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari BI ke OJK



Tim Transisi telah melakukan berbagai hal untuk memperlancar proses pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK yaitu:

- Bidang Pengawasan Perbankan telah menyusun Matriks Pendelegasian Wewenang dan Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan yang menjadi dasar bagi OJK untuk mengimplementasikan pengawasan jasa keuangan secara terintegrasi mulai tahun 2014
- Bidang Hukum telah melakukan dan kompilasi hukum terhadap 26 PBI, 59 SEBI Ekstern dan 12 SEBI Intern untuk dialihkan kepada OJK.
- Bidang Data dan Sistem Informasi, Logistik dan Dokumentasi, Dan Organisasi dan Sumber Daya Manusia serta Keuangan OJK telah membantu Tim Transisi untuk menyiapkan peralihan perangkat infrastruktur Kantor Pusat dan Kantor Regional/Kantor OJK seluruh Indonesia dari BI ke OJK.
- Dalam rangka menjamin kelancaran operasional OJK di periode awal setelah peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK, Tim Transisi telah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pejabat dan pegawai di Satuan Kerja Pengawasan Bank di Kantor Pusat, 6 Kantor Regional, dan 29 Kantor OJK, yang dikemas dalam *Workshop Aspek Shared Functions* OJK level eksekutif dan level teknis
- Bidang Keuangan telah menyelesaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2014 untuk Bidang Pengawasan Perbankan, termasuk RKA 6 (enam) Kantor Regional, dan 29 (dua puluh sembilan) Kantor OJK di daerah tahun 2014. RKA Bidang Pengawasan Perbankan OJK tahun 2014 tersebut merupakan bagian dari RKA OJK tahun 2014 yang telah disetujui oleh DPR RI pada Rapat Kerja tanggal 26 September 2013. Adapun dasar utama perhitungan penetapan anggaran dimaksud adalah anggaran Sektor Perbankan Bank Indonesia tahun 2013 dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan berdasarkan standar biaya yang berlaku di OJK.

## VIII. Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari BI ke OJK

Foto Peresmian KR OJK dari Aceh hingga Papua



Pelaksanaan upacara peresmian Kantor OJK di Menara Radius Prawiro, Bank Indonesia setelah acara serah terima fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2013.

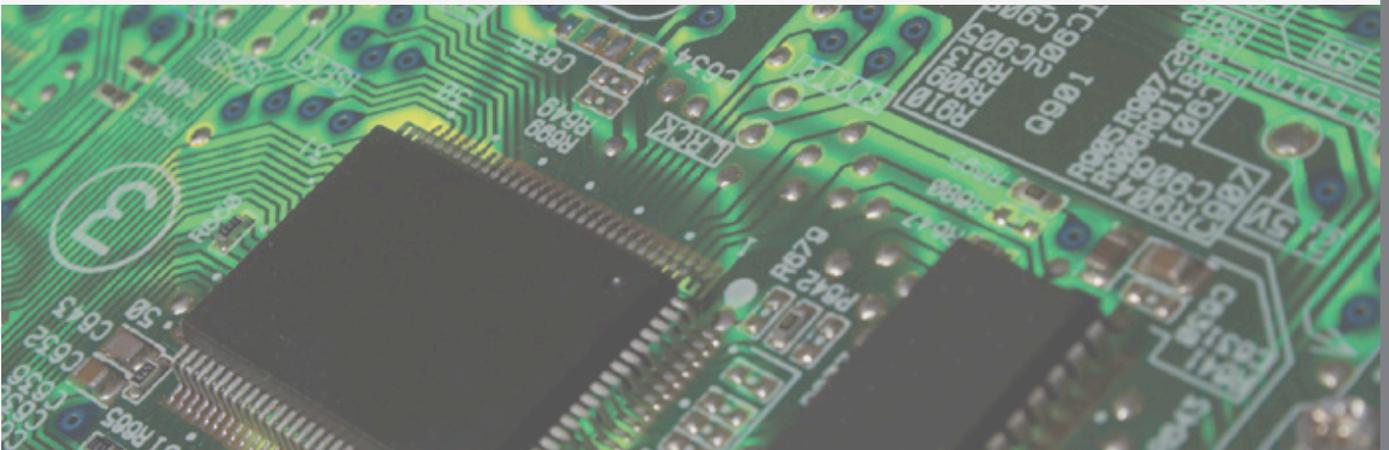
Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2014 dilaksanakan upacara peresmian (*launching*) Kantor Regional dan Kantor-Kantor OJK dari Aceh sampai Papua yang menyimbolkan wilayah kedaulatan NKRI.





**IX**

# Manajemen Strategis, Tata Kelola Organisasi dan FGD & Survei





## IX. Manajemen Strategis, Tata Kelola Organisasi dan FGD & Survei



Manajemen strategis (MS) dan tata kelola organisasi (TKO) merupakan faktor manajemen internal yang sangat penting dalam mendukung capaian sasaran strategis OJK 2013. Bidang kegiatan MS dan TKO adalah sebagai berikut:



### Komunikasi

Selama tahun 2013, OJK telah melakukan 113 sosialisasi di berbagai daerah tentang UU N0 21 Tahun 2011 Tentang OJK dan Kelembagaan OJK sendiri ke berbagai lapisan masyarakat. Hal ini ditunjang juga dengan kunjungan audiensi ke Pimpinan Daerah, kunjungan media, *Focus Group Discussion* (FGD) dan *talkshow* di berbagai media elektronik sebagai pendukung kegiatan sosialisasi tersebut.

### Hubungan Internasional

OJK telah menyelesaikan proses tahapan reaplikasi untuk dapat bergabung dalam IOSCO. OJK juga terlibat aktif dalam memberikan penjelasan atas asesmen dalam *country peer review* (CPR) yang dilakukan oleh Financial Stability Board (FSB). Kemudian OJK juga telah diterima sebagai anggota di Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Financial Market (IIFM). OJK juga diundang menjadi anggota Working Group on Banking Supervision dari forum EMEAP (Executive Meeting of East Asia Pacific Central Bank).

Di tingkat kerjasama regional, OJK terlibat dan berperan aktif dalam ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Dalam pelaksanaan inisiatif pemeringkat tata kelola melalui ASEAN CG Ranking, OJK telah melakukan asesmen terhadap 100 perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Di sektor asuransi, dalam kerangka ASEAN, pembahasan inisiatif integrasi asuransi ASEAN terus berlangsung melalui Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL) dan ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) yang merupakan forum regulator asuransi se ASEAN.

### Pengalihan Fungsi Pengawasan dan Pengaturan Perbankan ke OJK

Sampai dengan triwulan laporan secara umum seluruh Bidang Tim Transisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahap II telah merealisasikan program kerjanya sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam program kerja dan *project charter* Tim Transisi.

## IX. Manajemen Strategis, Tata Kelola Organisasi dan FGD & Survei

Tim Transisi telah berhasil dengan baik dalam melaksanakan tugasnya yaitu pengalihan pengawasan dan pengaturan perbankan dari BI ke OJK. Hal ini meliputi serah terima pengalihan BI ke OJK dan penyambutan pegawai pengawasan perbankan pada tanggal 31 Desember 2013 sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK, serta peresmian 6 Kantor Regional (KR) dan 29 Kantor OJK (KOJK) se-Indonesia pada tanggal 6 Januari 2014. Dengan bergabungnya pengawasan perbankan maka secara formal OJK mulai melakukan pengawasan terintegrasi pada seluruh sektor jasa keuangan.

### **Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi**

Kelancaran pelaksanaan tugas OJK tidaklah dapat dilepaskan dari dukungan aspek internal yang mencakup SDM, organisasi, infrastruktur, Teknologi Informasi dan tata kelola yang baik serta efektivitas manajemen strategi. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang handal, OJK juga telah membuka kesempatan melalui rekrutmen nasional pada triwulan III tahun 2013.

Dalam melakukan fungsinya, OJK memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), yaitu suatu sistem yang tidak saja mengatur pelaksanaan manajemen strategi, tetapi lebih komprehensif mengaitkannya dengan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penilaian kinerja OJK. Sistem ini juga telah menghasilkan output berupa laporan yang ditujukan kepada berbagai *stakeholders* seperti laporan kinerja OJK, *Strategy Map* dan usulan anggaran 2014.

Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) merupakan garda terdepan tata kelola OJK untuk meyakinkan seluruh proses kerja internal OJK berlangsung sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Kegiatan bidang AIMRPK yang dilakukan selama tahun 2013 berfokus pada pengembangan konsep kerja fungsi asuransi yang terintegrasi (*integrated assurance*), peningkatan sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK).

### **Rapat Dewan Komisioner (RDK)**

Dalam hal pengambilan keputusan, OJK memiliki Rapat Dewan Komisioner (RDK) yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di OJK. Berbagai keputusan strategis baik yang terkait dengan internal OJK maupun hubungan dengan *stakeholders* eksternal telah diambil melalui forum RDK yang dilakukan minimal satu kali dalam seminggu. Selain RDK juga terdapat forum *Board Seminar*.

## IX. Manajemen Strategis, Tata Kelola Organisasi dan FGD & Survei

Fungsi komunikasi juga memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itu OJK telah merancang strategi komunikasi internal dan eksternal yang diarahkan pada upaya untuk memperkenalkan keberadaan OJK kepada semua pemangku kepentingan di dalam dan luar negeri.

Dalam menjalankan mandatnya untuk melakukan pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan, OJK sangat memerlukan sistem informasi yang handal. Pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK sangat memerlukan penyediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi pendukung. Dalam hal penyediaan infrastruktur dan aplikasi Teknologi Informasi (TI) pengawasan perbankan meliputi : penyiapan data center ke-2 OJK, penyiapan jaringan komputer di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor Cabang, pengalihan aplikasi-aplikasi perbankan, pembangunan sarana pertukaran informasi terintegrasi (*repository data capturing*), penyiapan sistem aplikasi pendukung operasional, rancang bangun TI serta penyiapan SDM di bidang TI yang semuanya harus disiapkan menjelang dialihkannya fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke OJK.

### Control & Independent Assurance risk, quality & governance



1. Manajemen (dengan dukungan *risk management*) bertanggung jawab dalam mendisain dan mengimplementasikan pengendalian.
2. Internal audit (dengan dukungan *risk management*) bertanggung jawab untuk memberikan *independent assurance* atas disain pengendalian yang memadai dan penerapan yang efektif.
3. *Quality Assurance* unit memberikan *assurance* bahwa disain proses berkualitas dan menghasilkan produk berkualitas.

## IX. Manajemen Strategis, Tata Kelola Organisasi dan FGD & Survei

Implementasi *integrated assurance* memberikan manfaat, antara lain :

- Efisiensi melalui sinergi penerapan *assurance*
- *Coverage* risiko (*minimize blind spot*)
- Kesepahaman bahasa risiko dan *assurance*
- Meminimalkan "*assurance /audit fatigue*"
- Meminimalkan *business interruption*
- Efektivitas *corrective action*

### Infrastruktur

OJK saat ini menempati Gedung Bidakara, Menara Radius Prawiro Bank Indonesia dan Gedung Sumitro Djohadikusumo dan 34 gedung kantor/bangunan milik Bank Indonesia di daerah. Dalam hal penyesuaian ruang kantor OJK, pelaksanaan pemenuhannya berkoordinasi dengan Bank Indonesia yang dilakukan secara bertahap mengacu kepada mekanisme yang telah disepakati bersama antara OJK dan Bank Indonesia. Mekanisme tersebut telah tertuang dalam perjanjian pinjam pakai penggunaan kekayaan non teknologi informasi yang telah ditandatangani bersama antara OJK dengan Bank Indonesia pada bulan Desember 2013.



Sebagai tindak lanjut rencana pemanfaatan aset milik Kemenkeu untuk gedung kantor pusat OJK yang terpadu serta rencana pemanfaatan aset kekayaan milik negara untuk kantor regional dan kantor OJK, telah dibentuk: (1) Tim Pemanfaatan Aset Kementerian Keuangan oleh OJK dalam rangka pemanfaatan aset milik Kemenkeu untuk gedung kantor pusat OJK dan; (2) Tim Pemanfaatan Kekayaan Negara oleh OJK untuk pemanfaatan kekayaan negara untuk gedung kantor regional dan kantor OJK. Kedua tim tersebut masing-masing beranggotakan pejabat dan pegawai OJK serta Setjen Kementerian Keuangan (Setjen Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu). Untuk pemanfaatan aset milik Kemenkeu sebagai kantor pusat OJK, pembahasan awal dan koordinasi Tim dengan pejabat dan staf dari Setjen Kemenkeu telah dilakukan, khususnya rencana penggunaan aset milik Kementerian Keuangan di area Sudirman Central Business District (SCBD).

## IX. Manajemen Strategis, Tata Kelola Organisasi dan FGD & Survei

Menindaklanjuti pembahasan tersebut, tim akan melakukan kajian lebih lanjut perihal kebutuhan luas ruang dan sarana pendukungnya berdasarkan struktur organisasi dan formasi SDM OJK yang efektif. Hal ini terkait dengan luas ruang kerja yang akan disediakan untuk OJK. Hasil kajian dan rekomendasi Tim selanjutnya akan disampaikan ke Setjen Kementerian Keuangan. Sedangkan rencana untuk pemanfaatan aset kekayaan negara sebagai kantor regional dan kantor OJK telah dilakukan verifikasi bersama oleh tim dan wakil DJKN Kementerian terhadap aset tanah dan bangunan di beberapa lokasi kota di daerah yaitu Manado, Palu, Bandung, Tasikmalaya, Palembang, Mataram dan Makasar. Dari hasil verifikasi tersebut, Tim akan melakukan analisis kesesuaian kebutuhan akan kantor regional dan kantor OJK dengan ketersediaan tanah dan bangunan di beberapa lokasi tersebut.



## IX. Manajemen Strategis, Tata Kelola Organisasi dan FGD & Survei

### Penetapan Pengaturan Pengadaan Barang & Jasa di OJK

Penggunaan Sarana Pengadaan Secara Electronic (SPSE)  
melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Penempatan dan penyediaan ruang kantor  
beserta sarana dan fasilitas pendukung operasional lainnya  
bagi satuan kerja pada tiga lokasi gedung kantor yang berbeda



Gedung  
Bidakara



Gedung  
Bank Indonesia



Gedung  
Sumitro Djohadikusumo

Penempatan satuan kerja pada tiga lokasi yang berbeda menyulitkan koordinasi antar satuan kerja

Koordinasi dengan Setjen Kemenkeu untuk  
pemanfaatan aset tanah Kemenkeu di  
SCBD sebagai untuk kantor pusat OJK

Koordinasi dengan DJKN Kemenkeu juga  
dilakukan untuk pemanfaatan kekayaan  
negara berupa tanah dan bangunan di  
daerah untuk kantor Regional dan Kantor  
OJK

## IX. Manajemen Strategis, Tata Kelola Organisasi dan FGD & Survei

### Pelaksanaan FGD dan Survei

Dalam rangka mendapatkan masukan dan ekspektasi dari *stakeholder* utama OJK dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Survei di 6 kota besar di Indonesia. Adapun pokok-pokok hasilnya sebagai berikut:

#### Hasil FGD

1. Sosialisasi OJK belum merata terutama ke beberapa komunitas/asosiasi. Perlu bahasa dan metode komunikasi yang sesuai agar target sosialisasi lebih tepat sasaran.
2. Perlu memiliki 1 atau 2 *tagline* berdasarkan tugas utama OJK yang mudah diingat oleh masyarakat seperti keamanan investasi, perlindungan konsumen, stabilitas keuangan dan seterusnya.
3. OJK idealnya dapat mengarahkan IJK untuk turut serta melakukan edukasi dan literasi keuangannya terutama kepada nasabahnya sendiri. OJK juga nantinya harus dapat menjadi lembaga penengah dan penyelesaian masalah IJK
4. OJK perlu melakukan usaha preventif terhadap investasi ilegal dengan melakukan edukasi dan literasi jasa keuangan kepada masyarakat secara masif dan komprehensif melalui media massa.

#### Hasil Survei

1. Pengemasan kegiatan edukasi/sosialisasi yang dilakukan oleh OJK (yaitu : pilihan acara/media, bahasa, cara penyampaian) serta nilai manfaatnya, dipersepsikan positif (4.02 – 4.13).
2. Persepsi *stakeholder* terhadap OJK dalam keseluruhan aspek, secara rata-rata adalah positif (4.0 – 4.41).
3. Kemampuan serta kredibilitasnya dalam melindungi konsumen, cenderung dipersepsikan lebih baik dibandingkan kemampuan ataupun kredibilitasnya pada aspek-aspek lainnya.
4. Keyakinan terhadap kehandalan dukungan sistem dan peraturan yang dimiliki OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya–cenderung lebih tinggi dibanding tingkat keyakinan terhadap aspek lainnya.
5. Tingkat kepuasan *stakeholder* para pelaku di sektor pasar modal dan IKNB terhadap kinerja OJK dalam tahun 2013 dinilai telah mampu memenuhi standar kepuasan minimal.
6. Tingkat pengenalan terhadap keberadaan layanan FCC sudah cukup baik, mengingat 7 dari 10 *stakeholder* yang mengetahui keberadaan OJK, mengetahui juga keberadaan layanan FCC ini dan telah memenuhi tingkat kepuasan minimal.





**X**

**Metodologi  
Manajemen Strategi &  
Discipline Execution  
Berbasis  
Balanced Scorecard**



## X. Metodologi Manajemen Strategi & Discipline Execution Berbasis Balanced Scorecard

Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja mengintegrasikan 3 komponen utama:



1. Manajemen Strategi, yang terdiri dari perumusan, operasionalisasi, pelaksanaan dan monitoring, serta evaluasi pelaksanaan strategi.



2. Manajemen Anggaran, yaitu rencana keuangan yang disusun berdasarkan kegiatan dan rencana kerja.



3. Manajemen Kinerja, yang menilai kinerja berdasarkan pencapaian strategi, pelaksanaan tugas pokok dan realisasi anggaran.

Keterkaitan ketiga sistem tersebut dapat berjalan baik dengan Disiplin Eksekusi, yaitu: *"Focus is a natural principle. The sun's scattered rays are too weak to start a fire, but once you focus them with a magnifying glass they will bring paper to flame in seconds. The same is true of human beings—once their collective energy is focused on a challenge, there is little they can't accomplish"*

Terdapat 2 dua hal fundamental yang membuat eksekusi dari suatu perencanaan menjadi hal yang sulit dilaksanakan.

- Pertama, eksekusi membutuhkan perubahan perilaku dari pelakunya. Misalnya seseorang harus menyelesaikan tugas yang belum pernah dilakukan, maka dia harus mengubah perilakunya agar tugas dapat diselesaikan.
- Kedua, perubahan perilaku tidak mudah karena mengubah perilaku tersebut sering diganggu oleh tugas yang penting namun bersifat adhoc.

Untuk dapat memastikan tujuan dapat tercapai, maka diperlukan empat prinsip yang memberikan pedoman dalam melaksanakan eksekusi pekerjaan.



## X. Metodologi Manajemen Strategi & Discipline Execution Berbasis Balanced Scorecard

Pendekatan manajemen strategi di OJK pada dasarnya menggunakan model perumusan, pelaksanaan dan evaluasi yang berbasis metodologi *balance scorecard* dengan penyesuaian perspektif untuk lembaga publik.

Sistem yang diterapkan adalah sistem Manajemen Strategi Anggaran dan Kinerja (MSAK). Sistem ini mengintegrasikan antara proses perencanaan strategi dan kinerja dengan anggaran. Anggaran berbasis kinerja ini mengedepankan model *balance scorecard* sebagai alat (*tool*) untuk mengeksekusi strategi untuk mencapai kinerja secara berdisiplin.

Penyusunan strategi menggabungkan pendekatan top down untuk yang sifatnya *strategic direction* dan *bottom up* untuk mengakomodasi berbagai isu strategis pada tataran operasional. Selanjutnya arahan *top level* tersebut dikomunikasikan ke seluruh satker OJK agar proses *cascading* dan *alignment* baik level vertikal maupun horizontal.

Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan dengan mereview capaian kinerja seluruh satuan kerja (satker) dengan target sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) masing-masing satker.

Proses penilaian kinerja OJK 2013 dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Menggunakan dasar 8 Program Strategis (PS) OJK 2013 sebagaimana pidato Ketua DK OJK pada FEG Januari 2013
2. Melakukan asesmen dan verifikasi capaian 16 IKU OJK
3. Menghitung capaian kinerja sesuai target IKU dengan nilai maksimal 100%. Sedangkan pencapaian kinerja lainnya dalam rangka mendukung pencapaian SS dan IKU diberikan nilai maksimal 10%.
4. Memasukan aspek penyerapan anggaran, dengan proporsi bobot kinerja dan anggaran menjadi 80:20.

Berdasarkan proses asesmen dan verifikasi atas capaian kinerja, maka NILAI KINERJA OJK 2013: 100,75% yang diperoleh dari perhitungan nilai kinerja 110% dan realisasi penyerapan anggaran 63,73% ( $110\% \times 0,8 + 63,73\% \times 0,2$ ). Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka PREDIKAT ATAS NILAI KINERJA OJK 2013 tersebut adalah BAIK.

**XI**

# Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

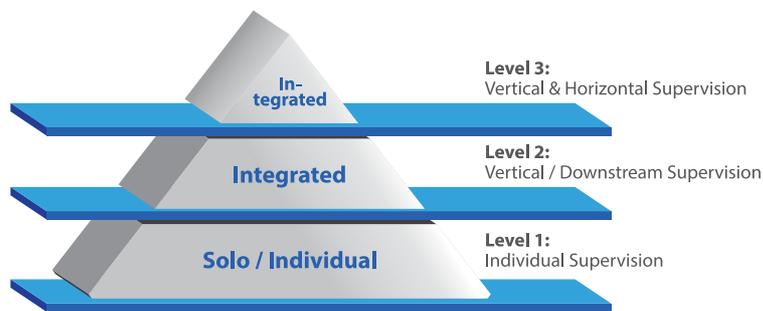




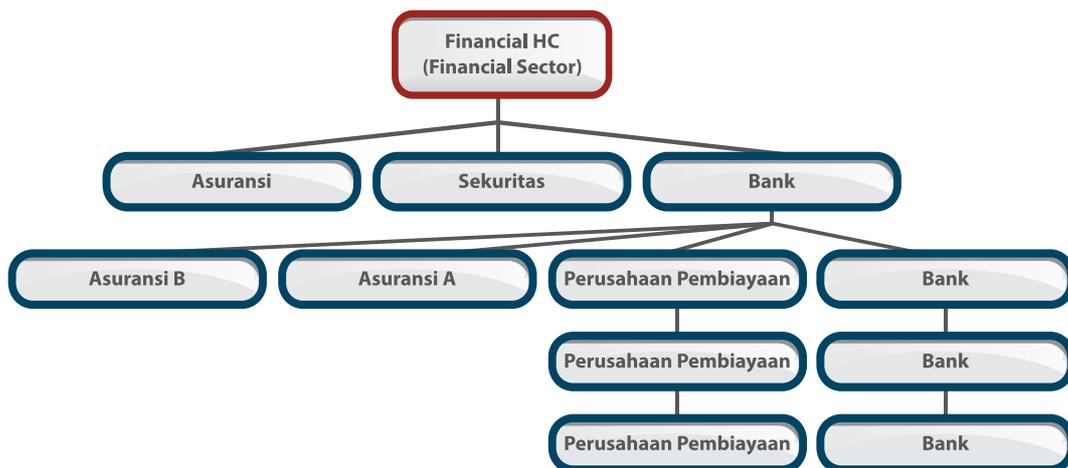
## XI. Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

**S**emakin meningkatnya keterkaitan antar lembaga dalam sektor keuangan menimbulkan banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan seperti tindakan *moral hazard*, tidak optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu diperlukan pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Pengawasan terintegrasi pada prinsipnya merupakan penguatan dan tidak menghilangkan fungsi pengawasan individual yang telah berjalan selama ini. Dalam hal ini terdapat 3 level pengawasan yang dijalankan di OJK yaitu: Level 1 merupakan pengawasan secara individual, Level 2 pengawasan yang bersifat *downstream*, dan level 3 pengawasan yang meliputi *downstream* dan *sister company* bagian dari konglomerasi keuangan.



3 Level Pengawasan di OJK



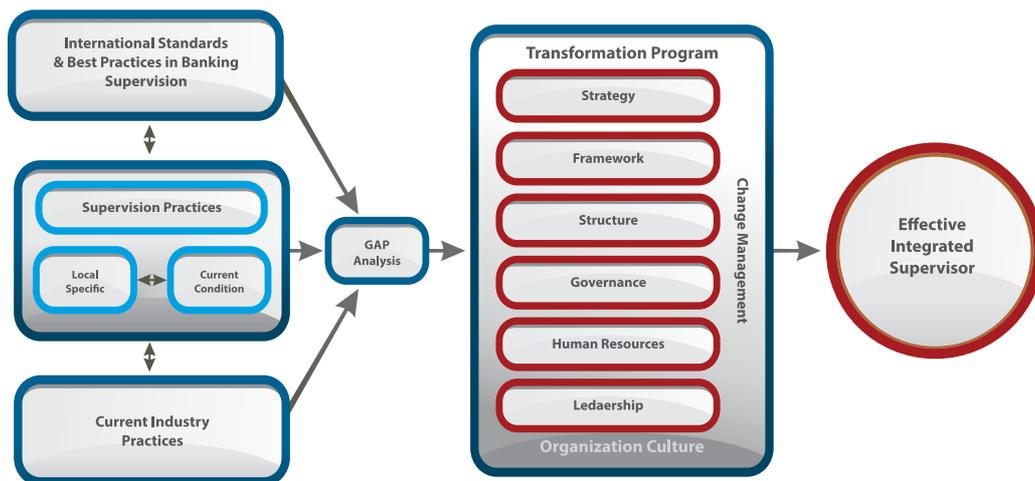
Cakupan pengawasan terintegrasi

## XI. Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

### Tahapan Pengawasan Terintegrasi

Pengawasan terintegrasi dibentuk dengan pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision*). Dalam melakukan pengawasan terintegrasi, dilakukan penilaian atas kondisi konglomerasi secara *group-wide* terhadap: (1) penerapan manajemen risiko termasuk transaksi intra-grup; (2) penerapan *good corporate governance*; (3) kondisi rentabilitas; dan (4) kecukupan permodalan. Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terintegrasi, OJK membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Terintegrasi yang melibatkan Pengawas dari sektor perbankan, institusi keuangan non bank, dan pasar modal.

Pengembangan pengawasan terintegrasi dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur dan industri.



Tahapan Pengawasan Terintegrasi



**XII**

**Forum Koordinasi  
Stabilitas  
Sistem Keuangan  
(FKSSK)**



## XII. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)

### **P**eningkatan Stabilitas Sistem Keuangan

Sebagai anggota Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), OJK juga berpartisipasi aktif dalam berbagai agenda yang diselenggarakan, mulai dari level teknis, *deputies meeting*, hingga *high-level meeting*. Pertemuan-pertemuan berkala FKSSK dimaksudkan untuk membahas kondisi terkini stabilitas sistem keuangan serta mengkoordinasikan kebijakan dan rencana tindak (*action plan*) yang akan diambil untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik. Di internal OJK, dalam kondisi pasar yang bergejolak, OJK terus mencermati perkembangan yang terjadi serta mempersiapkan antisipasi kebijakan yang diperlukan.

Tekanan terhadap pasar keuangan global dan regional yang terjadi sejak akhir triwulan II dan berlanjut sampai ke triwulan III juga berimbas pada kondisi domestik. Nilai tukar Rupiah terus mengalami tekanan, sementara IHSG menunjukkan pelemahan yang cukup signifikan.

### **Pertemuan FKSSK**

Selama triwulan III 2013, telah dilaksanakan pertemuan FKSSK level deputies (Wakil Menteri Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Kepala Eksekutif LPS) sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 29 Juli 2013, 19 Agustus 2013, dan 12 September 2013. Sedangkan pertemuan *high level* FKSSK (Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS) telah dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2013. Pertemuan FKSSK, baik *high level* maupun *deputies level*, dilaksanakan untuk melakukan asesmen atas kondisi terkini sistem keuangan, serta untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyikapi perkembangan yang terjadi. Berdasarkan asesmen dan diskusi masing-masing otoritas akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengatasi perburukan perekonomian. Sesuai dengan kewenangannya dalam bidang pasar modal, OJK telah mengeluarkan ketentuan pembelian kembali (*buyback*) saham.



## XII. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)

### Pengembangan Simulasi Krisis

Selain itu FKSSK juga akan melakukan program bersama yaitu persiapan dan pelaksanaan *full-dress crisis simulation* yang diadakan pada bulan November 2013. Tujuan diadakannya *full-dress crisis simulation* adalah untuk menguji koordinasi antar-institusi anggota FKSSK, menguji kesiapan Protokol Manajemen Krisis (PMK) pada masing-masing institusi, serta menguji kesiapan prosedur operasional dan *Crisis Binder* level nasional dalam penanganan krisis yang terjadi pada sistem keuangan domestik. Di samping itu, simulasi juga akan menguji *Crisis Binder* dari masing-masing otoritas dan regulasi yang sudah ada, serta memberikan panduan dalam perumusan kerangka kerja *Domestic Systemically Important Financial Institutions* (D-SIFI), khususnya *Domestic Systemically Important Banks* (D-SIB).

Sebagai bagian pelaksanaan fungsi menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK senantiasa mengembangkan perangkat pemantauan kondisi industri sektor jasa keuangan. Guna mengetahui secara dini peningkatan risiko di sektor jasa keuangan, OJK memerlukan *early warning system* dan *stress test modelling* yang komprehensif dan mencakup sektor eksternal. *Stress testing* bertujuan untuk menilai tingkat ketahanan institusi secara individu atas tekanan ekstrim yang terjadi sebagai akibat kondisi perekonomian secara umum ataupun faktor lainnya. Unsur yang akan dinilai meliputi ketahanan dari sisi likuiditas, solvabilitas, perubahan nilai tukar dan perubahan tingkat suku bunga. Kedua unsur terakhir merupakan faktor risiko pasar.

### Pengembangan Model Stress Test

Saat ini OJK tengah mengembangkan kerangka dan *model stress test* untuk industri keuangan yang meliputi Perusahaan Pembiayaan/*Multi Finance* dan Asuransi. *Stress test* akan melibatkan 3 (tiga) variabel utama yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Sementara untuk pengujiannya dibuat beberapa skenario kondisi ekstrim perekonomian.

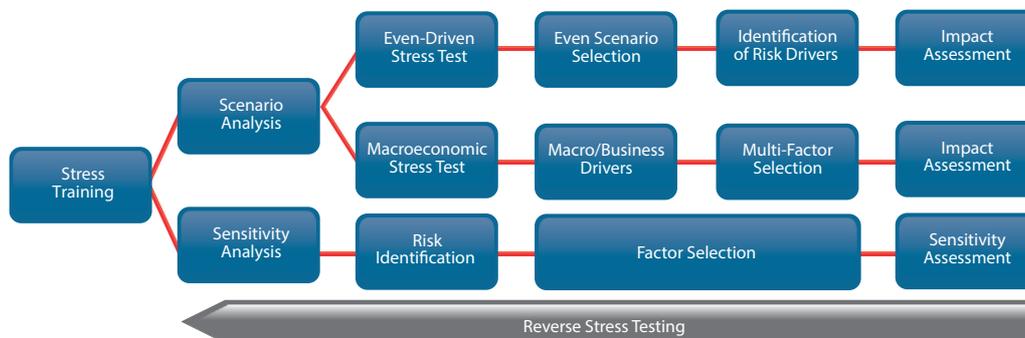
Selain menilai ketahanan masing-masing institusi jasa keuangan, hasil *stress test* diharapkan juga dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang kondisi krisis sebagai masukan bagi pembuat kebijakan untuk menentukan mitigasi risiko pemburukan keadaan. Saat ini model yang dikembangkan masih belum terintegrasi dan mempertimbangkan konektivitas antara institusi objek *stress testing*. Ke depan, penyesuaian dan penyempurnaan akan senantiasa dilakukan antara lain mempertimbangkan isu konglomerasi dan efek *contagion*, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu diperlukan pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

## XII. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)

Pengawasan terintegrasi pada prinsipnya merupakan penguatan dan tidak menghilangkan fungsi pengawasan individual yang telah berjalan selama ini. Dalam hal ini terdapat 3 level pengawasan yang dijalankan di OJK yaitu: Level 1 merupakan pengawasan secara individual, Level 2 pengawasan yang bersifat *downstream*, dan level 3 pengawasan yang meliputi *downstream* dan *sister company* bagian dari konglomerasi keuangan.

teknis, *deputies meeting*, hingga *high-level meeting*. Pertemuan-pertemuan berkala FKSSK dimaksudkan untuk membahas kondisi terkini stabilitas sistem keuangan serta mengkoordinasikan kebijakan dan rencana tindak (*action plan*) yang akan diambil untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik. Di internal OJK, dalam kondisi pasar yang bergejolak, OJK terus mencermati perkembangan yang terjadi serta mempersiapkan antisipasi kebijakan yang diperlukan.

Tekanan terhadap pasar keuangan global dan regional yang terjadi sejak akhir triwulan II dan berlanjut sampai ke triwulan III juga berimbas ke kondisi domestik. Nilai tukar Rupiah terus mengalami tekanan, sementara IHSG menunjukkan pelemahan yang cukup signifikan.



## XII. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)

### **Ex-officio Dewan Komisioner**

Keberadaan keanggotaan *ex-officio* pada Dewan Komisioner OJK dimaksudkan untuk koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Selain itu, keberadaannya diperlukan untuk memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Selama tahun 2013, kegiatan ADK *Ex-Officio* BI lebih difokuskan pada kegiatan internal OJK dan persiapan pengalihan fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia serta mengkoordinasikan kegiatan *task force* OJK BI dengan tim transisi OJK. Sementara Dewan Komisioner *Ex-Officio* Kementerian Keuangan juga aktif dalam memberikan pandangan dalam berbagai rapat dan keputusan/peraturan yang dibuat oleh OJK.



**XIII**

# Arah Strategi OJK 2014





### XIII. Arah Strategi OJK 2014

#### Destination Statement 2017

Menjadi lembaga profesional dalam pengaturan dan pengawasan SJK yang terintegrasi, guna mewujudkan pasar keuangan yang dalam (*fin. market deepening*) & Inklusif, serta terdepan dalam sistem perlindungan konsumen keuangan & masyarakat untuk mendukung terciptanya keuangan yang stabil & berkelanjutan.



### XIII. Arah Strategi OJK 2014

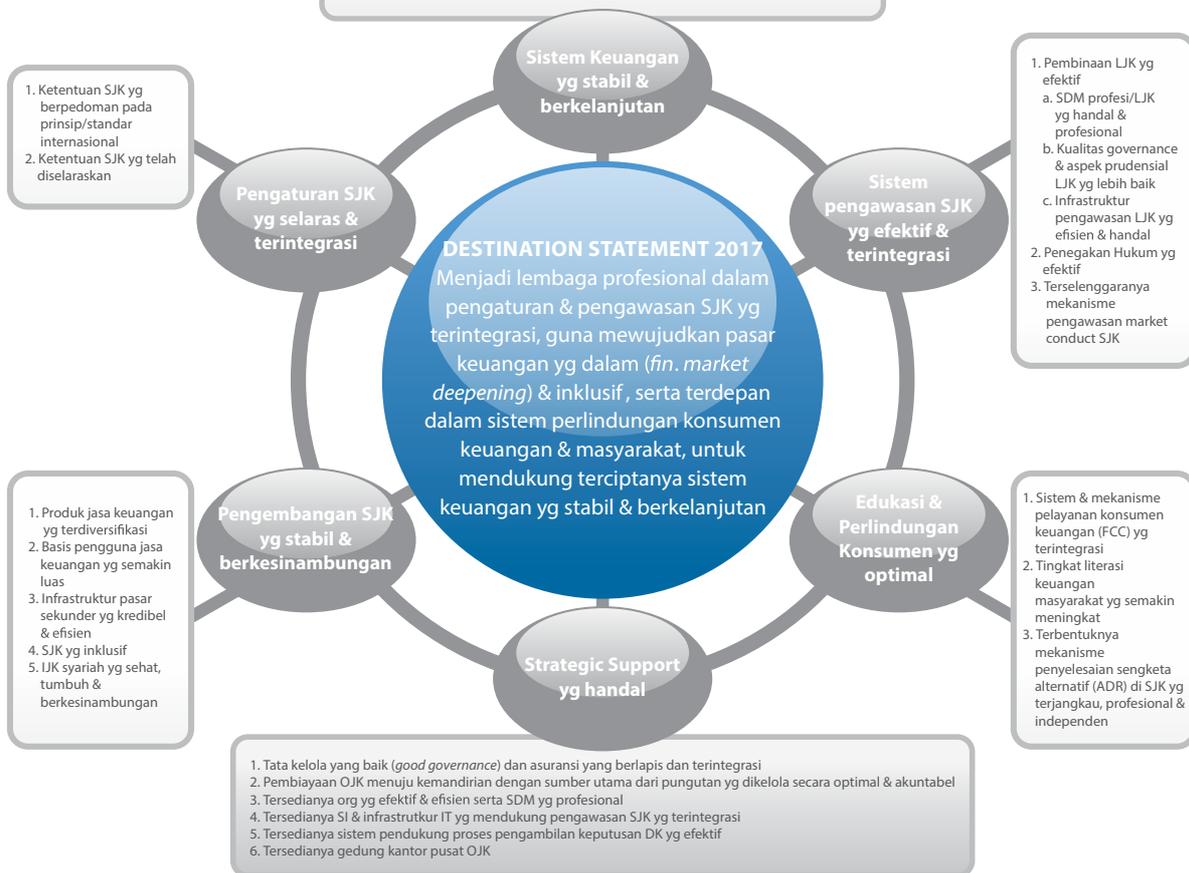
#### MISI & VISI

**MISI:** (1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;  
 (2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan  
 (3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

**VISI:** Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum

#### DESTINATION STATEMENT 2017

- 1. Pasar keuangan & SJK yg terselenggara secara efisien, adil, teratur & transparan
- 2. SJK yg berdaya tahan & berdaya saing tinggi di level domestik, regional & internasional



#### NILAI-NILAI STRATEGIS & GOOD GOVERNANCE

**NILAI-NILAI STRATEGIS:** Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, Visioner

**GOOD GOV.:** Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Oriented, Equity & Inclusiveness, Effectiveness & Efficiency, Accountability, participation